

LAPORAN CAPAIAN KINERJA

SEMESTER I
TAHUN 2017



SEKRETARIAT KABINET
2017

KATA PENGANTAR



Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Semester I Sekretariat Kabinet Tahun 2017 merupakan bentuk kegiatan pemantauan perkembangan kinerja secara periodik yang bermanfaat dalam memberikan kepastian dan pengendalian keserasian pelaksanaan program dengan perencanaan tujuan dan sasaran yang tertuang dalam rencana strategis Sekretariat Kabinet. Laporan Capaian Kinerja Semester I sekaligus juga merupakan bagian dari amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Capaian Sekretariat Kabinet dilaporkan dan dimonitor melalui Sistem Monitoring Capaian Kinerja (simonja.intranet) secara triwulanan. Pada dasarnya, laporan ini memuat hasil dan capaian kontrak kinerja Sekretariat Kabinet pada tahun anggaran berjalan sampai dengan triwulan kedua, yang selanjutnya akan disusun menjadi Laporan Kinerja (LKj) Tahunan pada triwulan terakhir. Laporan ini juga bertujuan untuk memantau progres dari pelaksanaan rekomendasi yang ada pada LKj tahun sebelumnya.

Segala hal yang termuat dalam laporan ini kiranya dapat memberi manfaat dalam pertimbangan dan keberlanjutan kebijakan Sekretariat Kabinet menuju Sekretariat Kabinet yang semakin berdaya saing dan sejahtera. Selain itu juga, kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan ini.

Jakarta, Juli 2017
Deputi Bidang Administrasi,



Farid Utomo

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Perjanjian Kinerja Sekretariat Kabinet Tahun 2017.....	1
BAB II ANALISIS CAPAIAN KINERJA.....	5
A. Capaian Kinerja Sekretariat Kabinet Semester I Tahun 2017	6
B. Capaian Lainnya.....	25
C. Rekomendasi Laporan Kinerja Sekretariat Kabinet Tahun 2016 dan Tindak Lanjutnya	26
D. Kendala dan Hambatan yang Dihadapi Sekretariat Kabinet.....	30
BAB III PENUTUP.....	32
LAMPIRAN	
Lampiran 1—Matriks Capaian Kinerja Sekretariat Kabinet Semester I Tahun 2017	
Lampiran 2—Penyerapan Anggaran Sekretariat Kabinet Semester I Tahun 2017	
Lampiran 3—Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia Sekretariat Kabinet Semester I Tahun 2017	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. : Perbandingan IKU Sekretariat Kabinet Tahun 2016 dan Tahun 2017.....	2
Tabel 1.2. : Perjanjian Kinerja Sekretariat Kabinet Tahun 2017.....	4
Tabel 2.1. : Capaian Kinerja Sekretariat Kabinet Semester I Tahun 2017.....	6
Tabel 2.2. : Capaian IKU 1 Sasaran I Sekretariat Kabinet Semester I Tahun 2017 per Bidang.....	9
Tabel 2.3. : Rekapitulasi Jumlah Arahan Presiden dan Janji Presiden Periode Januari-Juni 2017.....	11
Tabel 2.4. : Capaian IKU 2 Sasaran I Sekretariat Kabinet Semester I Tahun 2017 per Bidang.....	13
Tabel 2.5. : Capaian IKU 3 Sasaran I Sekretariat Kabinet Semester I Tahun 2017 per Bidang.....	17
Tabel 2.6. : Perbandingan Pernyataan Survei Kepuasan Pengelolaan Sidang Kabinet Tahun 2016 dan 2017.....	21
Tabel 2.7. : Jumlah Persentase Nilai Puas dan Sangat Puas Peserta Rapat Terbatas pada 4 Jenis Layanan Utama.....	22
Tabel 2.8. : Saran dan Masukan terkait Pengelolaan Persidangan Kabinet.....	23
Tabel 2.9. : Rekomendasi per Indikator Kinerja Sasaran.....	26

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. : <i>Dashboard</i> Capaian Sekretariat Kabinet pada SIMONJA	7
Gambar 2.2. : Target, Realisasi, dan Capaian IKU I Semester I Tahun 2017.....	9
Gambar 2.3. : Target, Realisasi, dan Capaian IKU II Semester I Tahun 2017....	13
Gambar 2.4. : Laman Muka Sistem Tindak Lanjut Arahan Presiden (SITAP)...	15
Gambar 2.5. : Target, Realisasi, dan Capaian IKU III Semester I Tahun 2017...	17
Gambar 2.6. : Target, Realisasi, dan Capaian IKU Sasaran Dua Semester I Tahun 2017.....	22

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelaporan kinerja diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Setiap entitas akuntabilitas kinerja menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja (LKj) atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. LKj terdiri dari LKj interim dan LKj tahunan. LKj interim di Sekretariat Kabinet dilaporkan melalui aplikasi *simonja.intranet*, capaian kinerja beserta data dukung dan realisasi anggaran per triwulan diinput oleh unit kerja dan dimonitor oleh pimpinan secara elektronik. LKj tahunan disusun pada akhir tahun dan disampaikan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN dan RB).

Laporan Capaian Kinerja Sekretariat Kabinet Semester I Tahun 2017 disusun untuk melaporkan tindak lanjut rekomendasi LKj Sekretariat Kabinet tahun sebelumnya dan melihat progres capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Kabinet sampai dengan semester I yang targetnya telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Sekretariat Kabinet Tahun 2017. Laporan ini berguna juga sebagai peringatan dini apabila terdapat permasalahan dalam mencapai target sehingga di paruh kedua Sekretariat Kabinet dapat meningkatkan upaya penyelesaian permasalahan dan hasil yang dicapai pada akhir tahun dapat optimal.

Laporan ini memuat gambaran ringkas capaian PK Sekretariat Kabinet sampai dengan triwulan II, tindak lanjut atas rekomendasi di dalam LKj Sekretariat Kabinet Tahun 2016, serta kendala maupun permasalahan yang dihadapi Sekretariat Kabinet selama satu semester.

B. Perjanjian Kinerja Sekretariat Kabinet Tahun 2017

PK Sekretariat Kabinet memuat IKU yang telah ditetapkan. Pada awal tahun 2017, Sekretariat Kabinet melakukan penyempurnaan IKU sebagai upaya memenuhi karakteristik indikator kinerja yang baik guna memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang lebih baik, meningkatkan akuntabilitas kinerja, serta menyelaraskan dengan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Kabinet. Berikut ini tabel perbandingan IKU Sekretariat Kabinet Tahun 2017, yang ditetapkan dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2017, dengan IKU tahun sebelumnya, yang ditetapkan dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2016.

Tabel 1.1. Perbandingan IKU Sekretariat Kabinet Tahun 2016 dan Tahun 2017

2016	INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT KABINET	2017
Sasaran 1: Terwujudnya Rekomendasi yang Berkualitas		Sasaran 1: Terwujudnya Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas
IKU 1: Persentase rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah		IKU 1: Persentase rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan yang dimanfaatkan
IKU 2: Persentase rekomendasi persetujuan atas izin prakarsa dan substansi rancangan PUU yang ditindaklanjuti		IKU 2: Persentase rekomendasi persetujuan atas izin prakarsa dan substansi rancangan PUU yang dimanfaatkan
IKU 3: Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan Wakil Presiden yang ditindaklanjuti		IKU 3: Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden yang dimanfaatkan
Sasaran 2: Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pengelolaan Persidangan Kabinet		Sasaran 2: Terwujudnya Pengelolaan Persidangan Kabinet yang Berkualitas
IKU 1: Persentase kepuasan peserta sidang kabinet terhadap penyelenggaraan sidang kabinet		IKU 1: Persentase tingkat kepuasan peserta sidang kabinet terhadap pengelolaan sidang kabinet
IKU 2: Persentase kepuasan peserta sidang kabinet terhadap risalah sidang kabinet		
Sasaran 3: Terwujudnya Peningkatan Layanan Sistem dan Teknologi Informasi Sekretariat Kabinet		
IKU 1: Jumlah pengakses <i>website</i> Sekretariat Kabinet		
IKU 2: Jumlah <i>pen-download</i> layanan data/informasi Sekretariat Kabinet		
IKU 3: Persentase kepuasan pengakses terhadap layanan <i>website</i> Sekretariat Kabinet		
IKU 4: Persentase kepuasan penyebaran informasi terkait kegiatan kabinet dan Sekretariat Kabinet		

Tabel di atas menunjukkan perubahan pada sasaran strategis IKU dimana pada tahun 2016 terdapat 3 (tiga) sasaran strategis, sedangkan tahun 2017 berubah menjadi 2 (dua) sasaran strategis. Hal ini selaras dengan revisi Renstra Sekretariat Kabinet Tahun 2015–2019 yang ditetapkan dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Sekretariat Kabinet Tahun 2015–2019. Sasaran ketiga yaitu

“Terwujudnya Peningkatan Layanan Sistem dan Teknologi Informasi Sekretariat Kabinet” diturunkan menjadi sasaran level program dengan pertimbangan bahwa sasaran ketiga tersebut merupakan tugas dan fungsi pendukung. Sekretariat Kabinet akan berfokus pada pemberian rekomendasi kebijakan serta pengelolaan persidangan kabinet yang berkualitas.

Penyempurnaan selanjutnya adalah pada indikator kinerja. Pada indikator kinerja sasaran pertama, frasa **ditindaklanjuti** diubah menjadi frasa **dimanfaatkan**. Perubahan ini dilakukan setelah mendapatkan masukan dari narasumber Kementerian PAN dan RB bahwasanya *stakeholder* Sekretariat Kabinet yang utama adalah Presiden dan Wakil Presiden RI, rekomendasi yang diberikan oleh Sekretariat Kabinet sifatnya bukan untuk memerintahkan *stakeholder* untuk menindaklanjuti tetapi lebih kepada memberikan saran dan pendapat sebagai pertimbangan pengambilan keputusan kebijakan, oleh karena itu lebih tepat digunakan frasa dimanfaatkan.

Pada sasaran kedua, yang sebelumnya menggunakan 2 (dua) buah indikator, survei yang pertama mengukur kepuasan peserta sidang kabinet terhadap penyelenggaraan sidang kabinet dan yang kedua mengukur kepuasan peserta sidang kabinet terhadap risalah sidang kabinet, pada tahun 2017 digabungkan menjadi 1 (satu) buah indikator yang mengukur kepuasan peserta sidang kabinet terhadap pengelolaan sidang kabinet. Pertimbangannya adalah frasa pengelolaan sidang kabinet sudah mencakup penyelenggaraan dan juga risalah sidang, sehingga pengukuran kinerja bisa lebih luas, mulai dari kepuasan atas perencanaan sampai hasil sidang kabinet yang dikelola Sekretariat Kabinet.

PK Sekretariat Kabinet memuat IKU dan tidak terdapat indikator kinerja tambahan. Target kinerja Sekretariat Kabinet tahun 2017 telah ditetapkan sama seperti tahun sebelumnya untuk tetap maksimal yaitu 100%, baik target indikator sasaran pertama maupun sasaran kedua. Target yang diperjanjikan dalam PK Sekretariat Kabinet Tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.2. Perjanjian Kinerja Sekretariat Kabinet Tahun 2017

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas	1. Persentase rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan yang dimanfaatkan	100%
		2. Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan yang dimanfaatkan	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
		3. Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden yang dimanfaatkan	100%
2.	Terwujudnya Pengelolaan Persidangan Kabinet yang Berkualitas	Persentase tingkat kepuasan peserta sidang kabinet terhadap pengelolaan sidang kabinet	100%

Sebagai upaya memperbaiki akuntabilitas kinerja dan supaya tujuan dan kinerja Sekretariat Kabinet benar-benar ditopang oleh unit-unit kerja di bawahnya, Sekretariat Kabinet mulai tahun 2017 menetapkan PK sampai dengan level eselon IV. Pada tahun sebelumnya PK disusun hanya sampai dengan level Eselon II. Hal ini dilakukan sebagai wujud implementasi dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan budaya kinerja sesuai dengan rekomendasi dari Kementerian PAN dan RB terhadap hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016, bahwa Sekretariat Kabinet perlu melakukan penjabaran kinerja sampai ke level eselon IV, agar terlihat secara nyata kontribusi kinerja yang terukur dari setiap jenjang jabatan terhadap pencapaian kinerja level di atasnya.

Pada bab selanjutnya akan dijelaskan capaian PK Sekretariat Kabinet sampai dengan semester I tahun 2017 serta tindak lanjut dari rekomendasi LKj 2016 pada tahun ini.

BAB II

ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Peran Sekretariat Kabinet sebagai lembaga pemerintahan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2015 dan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015, adalah memberikan dukungan pengelolaan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pengertian fungsi manajemen kabinet adalah Sekretariat Kabinet melaksanakan fungsi perencanaan, pengorganisasian, koordinasi, pengendalian, termasuk di dalamnya unsur pengawasan kebijakan dan program pemerintah. Sekretariat Kabinet berperan dalam pemberian dukungan staf, analisis, dan pemikiran kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan serta berperan aktif dalam keseluruhan siklus manajemen kebijakan, dari proses formulasi, implementasi, evaluasi, sampai dengan reformulasi/terminasi kebijakan.

Dukungan tersebut dijabarkan dalam Perseskab Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Sekretariat Kabinet Tahun 2015-2019. Dalam menyokong penyelenggaraan pemerintahan yang baik Sekretariat Kabinet menetapkan visi **“Menjadi Sekretariat Kabinet yang profesional dan andal dalam mendukung Presiden dan Wakil Presiden menyelenggarakan pemerintahan”**. Guna mewujudkan visi Sekretariat Kabinet, misi yang menjadi landasan kerja yang harus diikuti oleh seluruh pegawai Sekretariat Kabinet yaitu **“Memberikan dukungan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dengan memegang teguh pada prinsip tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*)”**.

Berlandaskan visi dan misi tersebut, Sekretariat Kabinet telah merumuskan langkah-langkah secara terarah membentuk tujuan yang disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang dihadapi dan sasaran strategis yang menggambarkan beberapa hal yang ingin dicapai pada jangka pendek setiap tahun selama 5 (lima) tahun ke depan. Berikut ini adalah tujuan dan sasaran strategis Sekretariat Kabinet:

 <p>TUJUAN</p>	<p>“Memberikan dukungan teknis, administrasi, dan pemikiran yang berkualitas dalam rangka mendukung Presiden dan Wakil Presiden menyelenggarakan pemerintahan”</p>
 <p>SASARAN</p>	<p>“Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas” dan “Terwujudnya pengelolaan persidangan kabinet yang berkualitas”</p>

A. Capaian Kinerja Sekretariat Kabinet Semester I Tahun 2017

Capaian sasaran strategis Sekretariat Kabinet tahun 2017 diukur dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam PK Sekretariat Kabinet tahun 2017. Pada tahun 2017 Sekretariat Kabinet menetapkan 2 (dua) sasaran strategis, yang ukuran keberhasiian capaiannya diukur melalui 4 (empat) Indikator Kinerja Utama (IKU).

Secara keseluruhan rata-rata capaian kinerja Sekretariat Kabinet semester I tahun 2017 adalah sebesar 97,45%, dengan rincian capaian per indikator kinerja sasaran sebagai berikut.

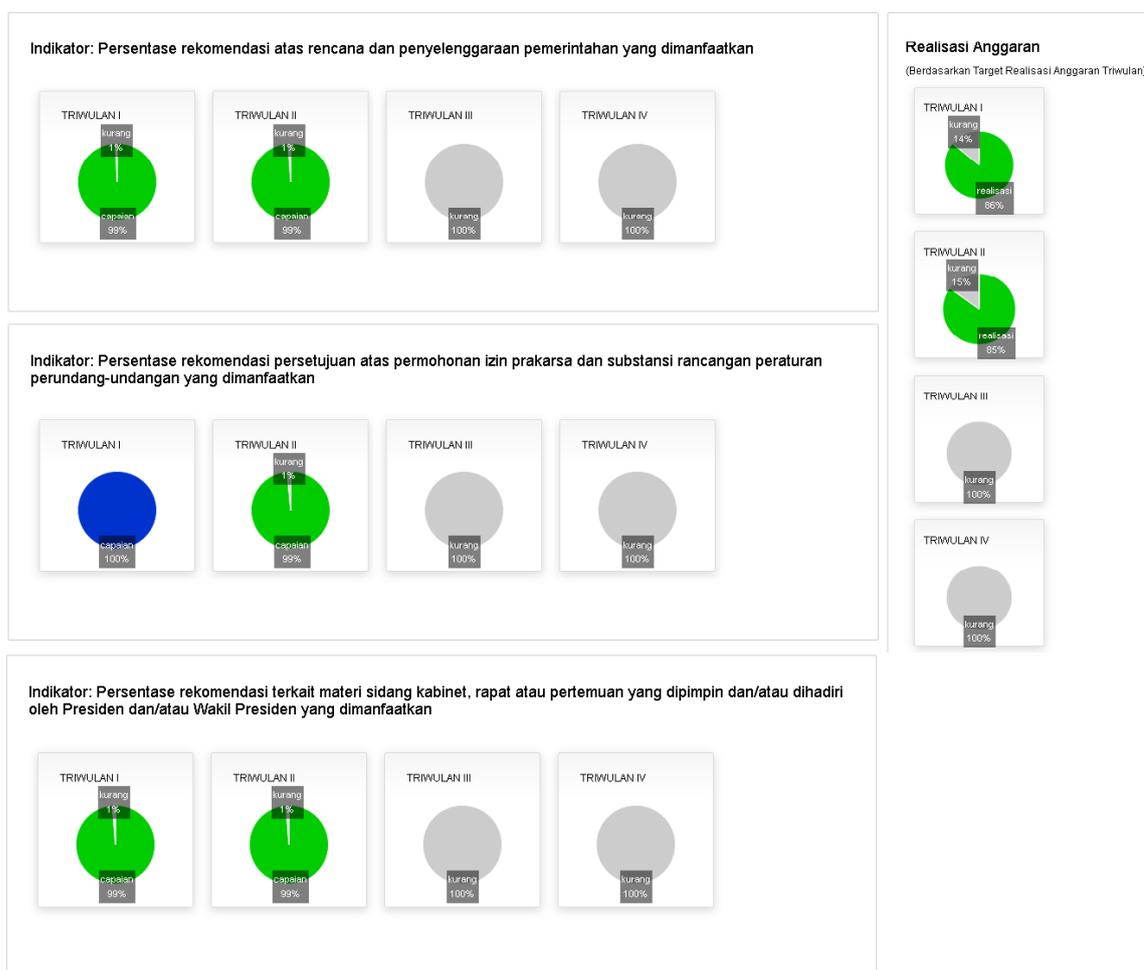
Tabel 2.1. Capaian Kinerja Sekretariat Kabinet Semester I Tahun 2017

CAPAIAN SEKRETARIAT KABINET SEMESTER I TAHUN 2017	
Sasaran 1: Terwujudnya Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas	
IKU 1 Persentase rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan yang dimanfaatkan	Target: 100% Realisasi: 98,99% Capaian: 98,99%
IKU 2 Persentase rekomendasi persetujuan atas izin prakarsa dan substansi rancangan PUU yang dimanfaatkan	Target: 100% Realisasi: 99,32% Capaian: 99,32%
IKU 3 Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden yang dimanfaatkan	Target: 100% Realisasi: 98,83% Capaian: 98,83%
Sasaran 2: Terwujudnya Pengelolaan Persidangan Kabinet yang Berkualitas	
IKU 1 Persentase tingkat kepuasan peserta sidang kabinet terhadap pengelolaan sidang kabinet	Target: 100% Realisasi: 92,64% Capaian: 92,64%

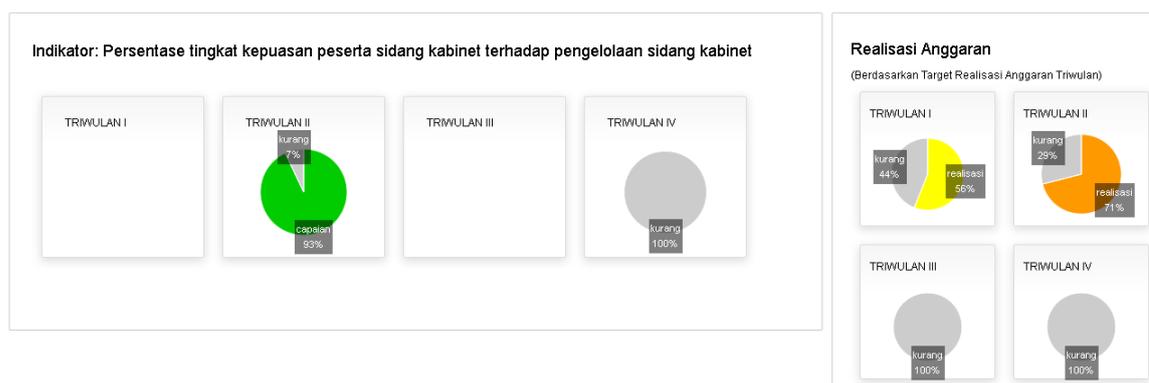
Capaian kinerja di atas merupakan hasil monitoring triwulanan terhadap capaian PK Sekretariat Kabinet, Eselon I dan Eselon II di lingkungan Sekretariat Kabinet yang dilakukan dengan menggunakan aplikasi Sistem Monitoring Capaian Kinerja (SIMONJA), berikut ini tampilan *dashboard* capaian Sekretariat Kabinet pada SIMONJA.

Gambar 2.1. Dashboard Capaian Sekretariat Kabinet pada SIMONJA

Sasaran: Terwujudnya Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas



Sasaran: Terwujudnya Pengelolaan Persidangan Kabinet yang Berkualitas



Uraian analisis pencapaian dari masing-masing sasaran akan dijabarkan berdasarkan indikator kerjanya. Berikut akan dijelaskan pencapaian indikator kinerja sasaran strategis pertama sampai dengan semester I tahun 2017.



“Terwujudnya Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas”

Sasaran pertama di dalam IKU dan PK telah diselaraskan dengan Renstra Sekretariat Kabinet revisi terakhir, perubahan nomenklatur sasaran strategi dari sebelumnya “Terwujudnya Rekomendasi yang Berkualitas” menjadi “Terwujudnya Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas” bertujuan untuk menyempurnakan sasaran, bahwa rekomendasi yang dihasilkan oleh Sekretariat Kabinet adalah rekomendasi kebijakan, sehingga terdapat kejelasan *output*. Penyempurnaan juga dilakukan pada rumusan indikator sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa frasa **ditindaklanjuti** diubah menjadi frasa **dimanfaatkan**. Perubahan ini dilakukan setelah mendapatkan masukan dari narasumber Kementerian PAN dan RB bahwasanya *stakeholder* Sekretariat Kabinet yang utama adalah Presiden dan Wakil Presiden RI, rekomendasi yang diberikan oleh Sekretariat Kabinet sifatnya bukan untuk memerintahkan *stakeholder* untuk menindaklanjuti tetapi memberikan saran dan pendapat sebagai pertimbangan pengambilan keputusan kebijakan, oleh karena itu lebih tepat digunakan frasa dimanfaatkan.

Sebagaimana tertuang di dalam Lampiran I Perseskab Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Sekretariat Kabinet, keberhasilan pencapaian sasaran strategis pertama diukur dengan menggunakan 3 (tiga) buah IKU dan pada tahun 2017 telah diperjanjikan target kinerja sebesar 100% untuk ketiga IKU tersebut. Selanjutnya akan dijabarkan capaian dari ketiga IKU, sebagai berikut:



PERSENTASE REKOMENDASI ATAS RENCANA DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG DIMANFAATKAN

Indikator kinerja pertama menunjukkan pencapaian kinerja Sekretariat Kabinet yang spesifik, relevan, dapat dicapai, dikuatifikasi dan diukur melalui pengukuran kualitas rekomendasi kebijakan yang terkait dengan tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet, yaitu:

- a. perumusan dan analisis rencana kebijakan dan program pemerintah;
- b. penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan; dan
- c. pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang politik, hukum, keamanan, perekonomian, pembangunan manusia, kebudayaan, dan kemaritiman.

Rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan yang dimanfaatkan berarti:

- a. Presiden dan/atau Wakil Presiden memanfaatkan/merespon memorandum Sekretaris Kabinet dalam kerangka perumusan dan pelaksanaan kebijakan; dan/atau

- b. Menteri/Pimpinan Lembaga memanfaatkan/merespon surat Sekretaris Kabinet terkait kebijakan pemerintah.

Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan terkait rencana dan penyelenggaraan pemerintahan yang dimanfaatkan oleh Presiden, Wakil Presiden, dan/atau K/L}}{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan terkait atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan yang disampaikan ke Presiden, Wakil Presiden, dan/atau K/L}} \times 100\%$$

Sampai dengan semester I tahun 2017, capaian kinerja IKU pertama adalah sebesar 98,99%, yaitu terdapat 488 rekomendasi kebijakan terkait rencana dan penyelenggaraan pemerintahan yang dimanfaatkan dari total *output* sebanyak 493 rekomendasi kebijakan, dengan rincian per bidang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.2. Capaian IKU 1 Sasaran I Sekretariat Kabinet Semester I Tahun 2017 per Bidang

Bidang	Output	Outcome	% Capaian
Politik, Hukum, dan Keamanan	159	156	98,11%
Perekonomian	123	122	99,19%
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	115	114	99,13%
Kemaritiman	96	96	100%
Total	493	488	98,99%

Gambaran target, realisasi dan capaian IKU pertama di semester I tahun 2017 dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Gambar 2.2. Target, Realisasi, dan Capaian IKU I Semester I Tahun 2017



Dari total *output* sebanyak 493 rekomendasi kebijakan, terdapat 5 (lima) buah rekomendasi kebijakan yang dianggap belum dimanfaatkan dikarenakan terdapat pertimbangan bahwa rekomendasi tersebut perlu dimonitor lagi perkembangannya sehingga tidak disampaikan ke Presiden atau *stakeholder* Sekretariat Kabinet.

Selama semester I, berikut ini beberapa rekomendasi kebijakan Sekretariat Kabinet yang telah dimanfaatkan oleh *stakeholder* terkait.

Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

1. Rekomendasi terkait penyelesaian terhadap *Investor-State Dispute Settlement* (ISDS) dalam perundingan *ASEAN-JAPAN Comprehensive Economic Partnership Subcommittee on Investment*;
2. Rekomendasi terkait aspirasi tujuh kepala adat di Papua terkait PT Freeport Indonesia;
3. Rekomendasi terkait *policy paper* tentang Strategi Pemberantasan Korupsi guna meningkatkan daya saing bangsa dalam rangka ketahanan nasional;
4. Rekomendasi terkait tuntutan untuk memberikan kompensasi/ganti rugi atas kerbau-kerbau yang diklaim secara sepihak di Pulau Komodo.

Bidang Perekonomian

1. Rekomendasi terkait pertimbangan untuk pembangunan gedung Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
2. Tindak Lanjut Arahan Presiden terkait dengan Kajian terhadap Penugasan Pemerintah kepada Perum Bulog dalam rangka pertahanan pangan nasional
3. Penetapan upah minimum propinsi dan upah minimum kabupaten/kota Tahun 2017
4. Rekomendasi terkait permohonan ikut berpartisipasi dalam mempercepat pelaksanaan pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)

Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

1. Rekomendasi terkait *requesting assistance from zakat/charity for maintenance and improvement of Islamic Cultural Center*
2. Laporan terkait Perjanjian Kerjasama Penyediaan Akomodasi Haji antara Pemerintah RI dengan Pengusaha Saudi Arabia
3. Laporan hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan jaminan sosial semester II Tahun 2016
4. Rekomendasi terkait keprihatinan tentang kebijakan yang membatasi muslim ke Amerika

Bidang Kemaritiman

1. Ringkasan eksekutif Laporan Keuangan Gabungan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dari kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi kuartal III Tahun 2016
2. Izin pembangunan gedung *cyber* BIN tahun anggaran 2017
3. Permohonan penetapan status dan bagi hasil Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT)
4. Tindak lanjut penanganan isu bangkai Kapal Perang Belanda di Laut Jawa

Salah satu *quick wins* Sekretariat Kabinet yang ditetapkan dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 3 tahun 2016 tentang *Quick Wins* Reformasi Birokrasi Sekretariat Kabinet adalah pemantauan tindak lanjut arahan Presiden. Dilaporkan dalam LKj Sekretariat Kabinet Tahun 2016 bahwa sebagai salah satu jabaran konkrit fungsi pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang politik, hukum, keamanan, perekonomian, pembangunan manusia, kebudayaan, dan kemaritiman (Pasal 3 huruf b, Perpres Nomor 25 Tahun 2015 tentang Sekretariat Kabinet), Sekretariat Kabinet telah mengembangkan Sistem Informasi Tindak Lanjut Arahan Presiden (SITAP). Pada tahun 2016, SITAP diujicobakan pada salah satu unit kedeputian yaitu Kedeputian Bidang Perekonomian dan akan diangkat ke level Sekretariat Kabinet pada tahun 2017. Pada semester I tahun 2017, SITAP telah diujicobakan ke seluruh kedeputian, yaitu Kedeputian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Kedeputian Bidang Perekonomian, Kedeputian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dan Kedeputian Bidang Kemaritiman.

Berikut ini adalah hasil evaluasi penggunaan SITAP untuk monitor tindak lanjut arahan/janji Presiden dalam sidang kabinet dan kunjungan kerja ke daerah periode Januari s.d. Juni 2017.

Tabel 2.3. Rekapitulasi Jumlah Arahan Presiden dan Janji Presiden Periode Januari–Juni 2017

Jenis	ARAHAN PRESIDEN															
	Bidang Polhukam				Bidang Perekonomian				Bidang PMK				Bidang Kemaritiman			
Triwulan	TW I		TW II		TW I		TW II		TW I		TW II		TW I		TW II	
Jumlah AP dan jumlah yang ditindaklanjuti	AP	TL	AP	TL	AP	TL	AP	TL	AP	TL	AP	TL	AP	TL	AP	TL
		9	4	6	0	35	4	28	0	9	4	6	0	28	7	24
Persentase tindak lanjut	44,44%		0%		11,42%		0%		44,44%		0%		25%		0%	
Jenis	JANJI PRESIDEN															
	Bidang Polhukam				Bidang Perekonomian				Bidang PMK				Bidang Kemaritiman			
Triwulan	TW I		TW II		TW I		TW II		TW I		TW II		TW I		TW II	
Jumlah JP dan jumlah yang ditindaklanjuti	JP	TL	JP	TL	JP	TL	JP	TL	JP	TL	JP	TL	JP	TL	JP	TL
		6	0	8	0	19	1	17	0	13	2	3	0	9	1	10
Persentase tindak lanjut	0%		0%		0,5%		0%		1,53%		0%		1,11%		0%	

Keterangan:

AP : Arahan Presiden

JP : Janji Presiden

TL : Tindak Lanjut

Data di atas merupakan hasil unggah yang dilakukan admin SITAP di Kedeputian Bidang Dukungan Kerja Kabinet sebagai pengelola persidangan kabinet, dan merupakan hasil *print out* SITAP (periode 1 Januari s.d. 30 Juni 2017) yang diproses pada tanggal 1 Agustus 2017 oleh Deputi Bidang Perekonomian selaku pengelola sementara SITAP.

Jumlah sidang kabinet ataupun kunjungan kerja ke daerah yang tercatat diunggah dalam SITAP pada triwulan I sebanyak 50 sidang dan pada triwulan kedua sebanyak 33 sidang. Keseluruhan sidang maupun kunjungan presiden selama satu semester menghasilkan sebanyak 145 arahan presiden dan 85 janji presiden. Tindak lanjut atas arahan presiden diawasi oleh keempat kedeputian sesuai bidangnya. Dapat dilihat pada tabel di atas bahwa jumlah arahan Presiden dan janji Presiden terbanyak adalah di bidang Perekonomian, dan diurutkan kedua terbanyak adalah bidang Kemaritiman.

Besar persentase tindak lanjut yang diunggah di SITAP per Juni 2017 menunjukkan angka yang rendah, bahkan di triwulan II masih 0 atau belum ada tindak lanjut. Hal ini disebabkan karena dalam tahap uji coba ini masih terdapat kendala terkait teknologi informasi SITAP yang perlu segera disempurnakan oleh Pusat Data Teknologi dan Informasi (Pusdatin) serta belum disepakati atau disusunnya alur kerja dan *time line* pengisian data SITAP (SOP). Dukungan dan komitmen dari seluruh pimpinan sangat dibutuhkan dalam menyelesaikan SITAP.

2 **PERSENTASE REKOMENDASI PERSETUJUAN ATAS PERMOHONAN IZIN PRAKARSA DAN SUBSTANSI RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG DIMANFAATKAN**

Indikator kedua yang digunakan untuk mengukur keberhasilan sasaran pertama adalah “Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan yang dimanfaatkan”, dengan target 100%. Indikator kinerja kedua menunjukkan pencapaian kinerja Sekretariat Kabinet yang terkait dengan tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet dalam pemberian persetujuan kepada Menteri Sekretaris Negara atas permohonan izin prakarsa penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan (RPUU) dan atas substansi RPUU. Rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi RPUU yang dimanfaatkan berarti:

- a. Memorandum Sekretaris Kabinet kepada Menteri Sekretaris Negara dan/atau K/L terkait persetujuan prakarsa dan persetujuan substansi suatu RPUU yang telah mendapat persetujuan Presiden; dan/atau
- b. Memorandum Sekretaris Kabinet terkait penyampaian hasil analisis RPUU yang dimanfaatkan dan/atau direspon oleh Presiden dan/atau K/L.

Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan terkait persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi RPUU yang disetujui/dimanfaatkan Presiden}}{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan terkait persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi RPUU yang disampaikan kepada Presiden}} \times 100\%$$

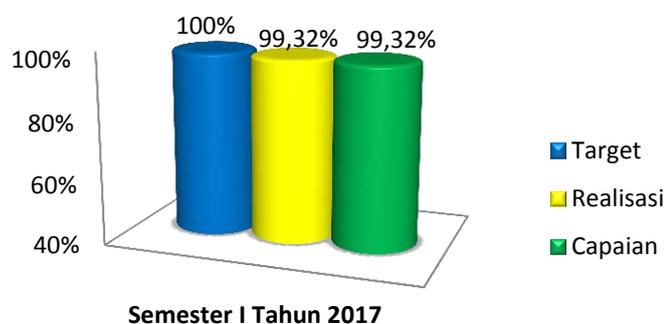
Capaian kinerja IKU kedua pada semester I tahun 2017 adalah sebesar 99,32%, yaitu terdapat 145 rekomendasi kebijakan terkait persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi RPUU yang disetujui/dimanfaatkan dari total *output* sebanyak 146 rekomendasi kebijakan, dengan rincian per bidang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.4. Capaian IKU 2 Sasaran I Sekretariat Kabinet Semester I Tahun 2017 per Bidang

Bidang	<i>Output</i>	<i>Outcome</i>	% Capaian
Politik, Hukum, dan Keamanan	34	33	97,06%
Perekonomian	36	36	100,00%
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	33	33	100,00%
Kemaritiman	43	43	100,00%
Total	146	145	99,32%

Pada semester I tahun 2017 capaian indikator kinerja kedua adalah sebesar 99,32%, terdapat 1 (satu) buah rekomendasi kebijakan terkait persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi RPUU yang belum disetujui/dimanfaatkan yaitu terkait RUU tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang masih perlu ditinjau kembali. Target, realisasi, dan capaian IKU kedua semester I tahun 2017 dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Gambar 2.3. Target, Realisasi, dan Capaian IKU II Semester I Tahun 2017



Selama semester I, berikut ini beberapa rekomendasi kebijakan terkait persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi RPUU Sekretariat Kabinet yang telah disetujui/dimanfaatkan oleh *stakeholder* terkait.

Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

1. Rekomendasi terkait permohonan izin prakarsa pengesahan *Final Acts of The World Radio Communication Conference, Geneva 2015* (Akta-akta Akhir Sidang Konferensi Komunikasi Radio Sedunia, Jenewa 2015)

2. Rancangan Keputusan Presiden (R. Keppres) tentang Kontingen Garuda Satuan Tugas Batalyon Komposit TNI pada Misi Pemeliharaan Perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Republik Afrika Tengah
3. Rancangan Peraturan Presiden (R. Perpres) tentang Otoritas Nasional Senjata Kimia dan R. Keppres tentang Susunan Keanggotaan Otoritas Nasional Senjata Kimia
4. Rekomendasi terkait permohonan izin prakarsa R.Keppres tentang Dewan Kerukunan Nasional

Bidang Perekonomian

1. Rancangan Instruksi Presiden (R. Inpres) tentang Percepatan Pembangunan Embung Kecil dan Bangunan Penampungan Air Lainnya di Pedesaan
2. Ratifikasi R. Perpres Protokol Perubahan Persetujuan antara Pemerintah RI dan Pemerintah Kerajaan Belanda untuk Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak yang Berkenaan dengan Pajak atas Penghasilan dan Protokolnya (P3B)
3. R. Perpres tentang Perubahan atas Perpres Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penugasan kepada Perusahaan Umum (Perum) Bulog dalam rangka Ketahanan Pangan Nasional
4. R. Perpres tentang Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik (*Roadmap e-commerce*) tahun 2016 s.d 2019

Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

1. R. Keppres tentang Panitia Nasional Penyelenggaraan Asian Games XVIII Tahun 2018 dan R. Perpres tentang Penyelenggaraan Asian Games XVIII Tahun 2018
2. R. Keppres tentang Tim Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
3. R. Inpres tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
4. R. Perpres tentang Komisi Nasional Lanjut Usia

Bidang Kemaritiman

1. R. Perpres tentang Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional
2. R. Perpres tentang Rencana Umum Energi Nasional
3. Rancangan perubahan Perpres nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan
4. R. Perpres tentang kebijakan kelautan Indonesia

SITAP yang pada awal mulanya digagas hanya untuk memantau arahan Presiden, kemudian berkembang fungsinya untuk memantau rekomendasi hasil laporan kunjungan luar negeri Menteri atau Pimpinan Lembaga yang disampaikan ke Presiden melalui Sekretariat Kabinet serta memantau posisi RPUU. Dengan bantuan SITAP, pemantauan

proses kerja penyiapan RPUU dapat lebih cepat dilakukan. Status atau posisi dari RPUU dibagi menjadi 11 (sebelas) tahap status, yaitu:

1. Program Legislasi Nasional (Prolegnas)
2. Permohonan Persetujuan RPUU
3. Persetujuan RPUU dari Presiden
4. Pembahasan RPUU di K/L oleh Panitia Antar Kementerian (PAK)
5. Harmonisasi RPUU di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
6. Persetujuan/Pertimbangan Substansi
7. Permohonan Paraf Persetujuan Menteri
8. Pengajuan RPUU kepada Presiden
9. Penomoran dan Pengundangan PUU
10. Otentifikasi dan Distribusi PUU
11. Pusdatin (pengunggahan pada Sistem Peraturan Perundang-undangan atau SIPUU)

Melalui aplikasi SITAP, nantinya Sekretariat Kabinet dapat memantau tahap (*progress*) pembahasan dan penyusunan RPUU, berfungsi sebagai pengendalian, serta pemberian informasi yang lebih cepat dan akurat kepada K/L pemrakarsa.

Terkait sistem kunjungan menteri ke luar negeri telah dilaksanakan uji coba dari bulan Maret tahun ini dan telah dilakukan bimtek. Sedangkan informasi posisi RPUU telah diuji coba sejak bulan April. Berikut ini tampilan laman muka SITAP dengan penambahan fitur monitoring laporan kunjungan luar negeri dan posisi RPUU.

Gambar 2.4. Laman Muka Sistem Tindak Lanjut Arahan Presiden (SITAP)

No.	POKOK BAHASAN	JUMLAH ARAHAN PRESIDEN	BELUM DITINDAKLANJUTI	SEDANG DITINDAKLANJUTI	SUDAH DITINDAKLANJUTI
1.	Sambutan Presiden Republik Indonesia pada Pencatatan Perdana Kontrak Investasi Kolektif – Efek Beragun Aset (KIK – EBA) Mandiri – PT Jasa Marga, Tbk. (JSMR 01) Surat Berharga Hak Atas Pendapatan Tol Jagorawi	1	1	0	0
2.	Percepatan Pemerataan Pembangunan	24	24	0	0
3.	Sambutan Presiden Republik Indonesia pada Penyerahan Kartu Indonesia Pintar (KIP)	1	1	0	0
4.	Sambutan Presiden Republik Indonesia pada acara Peresmian Pembukaan Pameran Indonesia Properti Expo Tahun 2017	3	3	0	0
5.	Peresmian Museum Keris Nusantara Kota Surakarta	1	1	0	0
6.	Peresmian Pembukaan Simposium Internasional Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal ideologi dan	0	0	0	0



PERSENTASE REKOMENDASI TERKAIT MATERI SIDANG KABINET, RAPAT ATAU PERTEMUAN YANG DIPIMPIN DAN/ATAU DIHADIRI OLEH PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN YANG DIMANFAATKAN

Indikator ketiga yang digunakan untuk mengukur keberhasilan sasaran pertama adalah “Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden yang dimanfaatkan”, dengan target 100%. Indikator kinerja ketiga menunjukkan pencapaian kinerja Sekretariat Kabinet yang terkait dengan tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet dalam penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden yang dimanfaatkan berarti:

- a. Presiden dan/atau Wakil Presiden telah menerima/memanfaatkan usulan Sekretaris Kabinet untuk menyelenggarakan sidang kabinet, rapat terbatas, dan/atau pertemuan yang dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden;
- b. Presiden dan/atau Wakil Presiden memberikan arahan dalam sidang kabinet, rapat terbatas, dan/atau pertemuan yang dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden. Arahan Presiden tersebut (yang sebagian atau seluruhnya) sesuai dengan rekomendasi terkait materi sidang yang disampaikan oleh Sekretaris Kabinet, yang tercermin dari risalah sidang; dan/atau
- c. Presiden dan/atau Wakil Presiden telah menerima butir wicara/konsep pidato Presiden yang disiapkan oleh Sekretaris Kabinet dan dimanfaatkan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden tercermin dari pidato/arahan/sambutan Presiden yang sebagian atau seluruhnya sesuai dengan rekomendasi/butir wicara/konsep pidato Presiden yang telah disampaikan Sekretaris Kabinet.

Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden yang dimanfaatkan}}{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden yang disampaikan}} \times 100\%$$

Capaian kinerja IKU ketiga pada semester I tahun 2017 adalah sebesar 98,83%, yaitu terdapat 424 rekomendasi kebijakan terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden yang

dimanfaatkan dari total *output* sebanyak 429 rekomendasi kebijakan, dengan rincian per bidang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.5. Capaian IKU 3 Sasaran I Sekretariat Kabinet Semester I Tahun 2017 per Bidang

Bidang	<i>Output</i>	<i>Outcome</i>	% Capaian
Politik, Hukum, dan Keamanan	112	111	99,11%
Perekonomian	140	139	99,29%
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	82	79	96,34%
Kemaritiman	95	95	100,00%
Total	429	424	98,83%

Target, Realisasi, dan Capaian IKU ketiga semester I tahun 2017 dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Gambar 2.5. Target, Realisasi, dan Capaian IKU III Semester I Tahun 2017



Capaian IKU ketiga pada semester I tahun 2017 ini capaiannya sebesar 98,83%. Terdapat 5 (lima) buah rekomendasi kebijakan terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden yang dianggap tidak dimanfaatkan yang disebabkan karena keterlambatan penyampaian dan kegiatan telah terlaksana.

Berikut ini beberapa rekomendasi kebijakan terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden yang telah dimanfaatkan.

Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

1. Butir wicara dan bahan substansi Presiden RI dalam kunjungan resmi Perdana Menteri Jepang Y.M. Shinzo Abe, 15-16 Januari 2017
2. Matriks laporan perkembangan arah kebijakan Pemerintah Amerika Serikat (*America First*) serta dampak dan rekomendasi respon kebijakan pemerintah Indonesia
3. *Briefing note* terkait serangan Amerika Serikat ke Suriah
4. *Briefing sheet* dan infografis terkait audiensi Presiden dengan Badan Koordinasi Muballigh se-Indonesia.

1. Bahan sidang kabinet paripurna mengenai : 1) Kapasitas dan pagu indikatif RAPBN Tahun 2018 dan 2) Peningkatan peringkat kemudahan berusaha/*ease of doing business* Indonesia tahun 2018
2. *Briefing Note* peresmian Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Nanga Badau Kabupaten Kapuas Hulu dan PLBN Arup Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat, tanggal 16-18 Maret 2017
3. Pokok-pokok sambutan Presiden RI dalam pembukaan Indonesia-Korea *Business Summit*
4. *Briefing sheet* Ratas Tindak Lanjut Program National Branding

Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

1. Sambutan Presiden dalam Pembukaan Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) Tahun 2017
2. Butir wicara kunjungan Perwakilan *United Nation Children's Fund* (UNICEF)
3. Catatan dan infografis terkait Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) dalam kunjungan kerja Presiden ke Kota Batam, Kabupaten Mandailing Natal dan Kabupaten Tapanuli Tengah
4. *Briefing sheet* perkembangan penggunaan anggaran Asian Games XVIII dan Asian Para Games Tahun 2018

Bidang Kemaritiman

1. Bahan Ratas Pengembangan Program TOL Laut dengan Pos Logistik dan Jembatan Udara (TOL Udara)
2. *Briefing sheet* Ratas tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan dan batu bara
3. Penyampaian butir wicara dalam rangka *ground breaking* bandar udara Kulon Progo DIY
4. *Briefing sheet* evaluasi pelaksanaan proyek stranas dan program prioritas di Provinsi Kalimantan Tengah dan Sulawesi Utara

Sekretariat Kabinet dalam rangka pencapaian IKU 3 menganalisis dan mengolah materi sidang atas usulan sidang/rapat terbatas menghasilkan pertimbangan perlu tidaknya suatu permasalahan diangkat ke dalam sidang/rapat terbatas. Sekretariat Kabinet juga berperan dalam memberikan rekomendasi perlu atau tidaknya Presiden menerima permohonan audiensi ataupun menghadiri acara atau *event* tertentu. Selama kurun waktu satu semester tahun 2017 terdapat 89 surat masuk Sekretariat Kabinet terkait ajuan audiensi Presiden dan 42 surat masuk Sekretariat Kabinet terkait audiensi Sekretaris Kabinet.

Salah satu upaya yang telah dilakukan Sekretariat Kabinet pada tahun 2016 untuk meningkatkan kinerja pemberian rekomendasi terkait materi sidang kabinet adalah dengan mengeluarkan Surat Edaran Nomor SE.1/Seskab/VII/2016 tentang Prosedur Persiapan dan Penyampaian Bahan Sidang Kabinet/Rapat Terbatas pada tanggal 13 Juli 2016. Surat Edaran tersebut memuat ketentuan format bahan sidang, prosedur penyampaian yaitu 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan sidang kabinet/rapat terbatas, dan apabila penjadwalan pelaksanaan sidang kabinet/rapat terbatas kurang dari 3 (tiga) hari maka bahan disampaikan sekurang-kurangnya 4 (empat) jam sebelum pelaksanaan sidang kabinet/rapat terbatas. Menindaklanjuti pelaksanaan Surat Edaran tersebut Sekretariat Kabinet berencana untuk menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) internal antar kedeputusan substansi tentang mekanisme pelaksanaan penyiapan bahan terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.



AKUNTABILITAS KEUANGAN SASARAN I

Anggaran yang diperjanjikan untuk mencapai sasaran strategis pertama merupakan alokasi anggaran pada program “Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam Penyelenggaraan Pemerintahan” yaitu sebesar Rp.15.923.000.000,00. Pada semester I tahun 2017, dalam rangka peningkatan dan penajaman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2017, Presiden Joko Widodo menetapkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2017 tentang Efisiensi Belanja Barang Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 pada tanggal 22 Juni 2017. Menindaklanjuti Inpres tersebut, Sekretariat Kabinet melakukan pemotongan anggaran sebesar Rp.5.000.000.000,00. Alokasi pemotongan untuk sasaran pertama adalah sebesar Rp.1.171.931.000,00 sehingga anggaran yang tersedia untuk pencapaian sasaran I setelah revisi menjadi Rp.14.751.069.000,00. Target penarikan dana sampai dengan semester I tahun 2017 adalah sebesar Rp.7.779.573.835,00 dan terserap sebesar Rp.6.623.011.814,00 atau 85,13%. Jika dibandingkan dengan total anggaran sampai dengan akhir tahun maka penyerapan pada semester I tahun 2017 sudah 44,89%, penggunaan anggaran hampir optimal mendekati 50% dengan capaian kinerja sebesar 99,05%. Diharapkan pada semester II capaian kinerja dapat ditingkatkan serta pelaksanaan kegiatan lebih efektif dan efisien.



“Terwujudnya Pengelolaan Persidangan Kabinet yang Berkualitas”

Sasaran kedua di dalam IKU dan PK telah diselaraskan pula dengan Renstra Sekretariat Kabinet revisi terakhir. Nomenklatur sasaran strategis pada tahun sebelumnya “Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pengelolaan Persidangan Kabinet” disesuaikan

menjadi “Terwujudnya Pengelolaan Persidangan Kabinet yang Berkualitas”. Pengelolaan persidangan kabinet yang berkualitas diwujudkan dengan proses perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pendokumentasian serta pendistribusian hasil sidang kabinet secara cepat dan tepat. Penyempurnaan juga dilakukan pada jumlah dan rumusan indikator sebagaimana telah dijelaskan pada bab I, bahwa pada tahun 2016 sasaran 2 menggunakan 2 (dua) buah indikator berupa survei. Survei yang pertama mengukur kepuasan peserta sidang kabinet terhadap penyelenggaraan sidang kabinet dan yang kedua mengukur kepuasan peserta sidang kabinet terhadap risalah sidang kabinet. Selanjutnya pada tahun 2017 digabungkan menjadi 1 (satu) buah indikator yang mengukur kepuasan peserta sidang kabinet terhadap pengelolaan sidang kabinet. Pertimbangannya adalah frasa pengelolaan persidangan kabinet memiliki cakupan yang lebih luas, mulai dari perencanaan sampai dengan hasil sidang kabinet yang dikelola oleh Sekretariat Kabinet. Walaupun pengukuran yang dilakukan atau termuat dalam kuesioner masih sama yakni mencakup penyelenggaraan dan risalah sidang, namun ke depan terbuka kesempatan untuk menambahkan komponen survei lainnya yang terkait dengan pengelolaan persidangan kabinet.

Perseskab Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penetapan IKU di lingkungan Sekretariat Kabinet, dalam lampiran I menjelaskan bahwa pada keberhasilan pencapaian sasaran strategis kedua diukur menggunakan 1 (satu) buah IKU dan telah diperjanjikan dengan target kinerja sebesar 100%. IKU sasaran dua menunjukkan pencapaian kinerja Sekretariat Kabinet yang spesifik, relevan, dapat dicapai, dikuantifikasi, dan diukur melalui pengukuran kualitas kinerja Sekretariat Kabinet terkait penyiapan, pengadministrasian, penyelenggaraan, dan pengelolaan sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan hasil survei. Survei diperhitungkan setiap enam bulan sekali dengan cara membagikan kuesioner kepada responden peserta sidang kabinet, yang terdiri atas:

- a. Menteri Kabinet Kerja dan Pejabat Setingkat Menteri;
- b. Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
- c. Pejabat Eselon I Kementerian/Lembaga;
- d. Pejabat Lainnya.

Aspek utama yang menjadi landasan untuk mengukur IKU dari sasaran dua ini ditandai dengan kepuasan peserta sidang kabinet terhadap pengelolaan persidangan kabinet. Semakin puas peserta sidang kabinet maka semakin berkualitas pengelolaan persidangan kabinet tersebut. Apabila di tahun sebelumnya survei dilakukan 1 (satu) kali setiap semester pada Sidang Kabinet Paripurna, pada tahun 2017 ini survei juga dilakukan 1 (satu) kali setiap semester, namun dilakukan pada saat rapat terbatas yang hasilnya dihitung untuk menjadi realisasi dan capaian semesteran.

Pada tahun 2016 survei menggunakan kuesioner dengan pernyataan sebanyak 4 (empat) buah, sedangkan pada tahun 2017 dilakukan perbaikan dengan menambah 2 (dua) buah pernyataan sehingga totalnya menjadi 6 (enam) buah pernyataan. Perubahan lain ada pada pilihan jawaban survei. Pada tahun 2016 pilihan jawaban terdiri dari 2 (dua) kriteria jawaban yaitu “Ya” atau “Tidak”, sedangkan pada tahun 2017 pilihan jawaban berubah menjadi skala kepuasan yang terdiri dari 5 (lima) kriteria jawaban yaitu sangat tidak puas, tidak puas, kurang puas, puas, dan sangat puas. Perubahan ini bertujuan untuk memberikan responden memiliki pilihan jawaban yang lebih variatif sehingga penilaian yang diberikan terhadap kinerja pengelolaan anggaran menjadi lebih obyektif. Perbandingan pernyataan yang digunakan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.6. Perbandingan Pernyataan Survei Kepuasan Pengelolaan Sidang Kabinet Tahun 2016 dan 2017

Pernyataan Survei Tahun 2016		Pernyataan Survei Tahun 2017	
1.	Informasi penyelenggaraan sidang kabinet diterima dengan cepat	1.	Informasi penyelenggaraan sidang kabinet diterima dengan cepat
2.	Sarana dan prasarana sidang kabinet lengkap	2.	Sarana dan prasarana sidang kabinet lengkap
3.	Penayangan paparan materi sidang kabinet dapat dilihat dengan jelas oleh peserta sidang kabinet	3.	Penayangan paparan materi sidang kabinet dapat dilihat dengan jelas
4.	Risalah sidang kabinet membantu dalam menindaklanjuti arahan presiden.	4.	Risalah sidang kabinet diterima dengan cepat
		5.	Risalah sidang kabinet dibaca dengan jelas
		6.	Arahan Presiden dalam risalah bermanfaat untuk ditindaklanjuti

Metode penilaian untuk mengukur tingkat kepuasan menggunakan rumus sebagai berikut.

$$\frac{\sum (\text{Persentase nilai puas dan sangat puas pada layanan utama}_1 + \text{Persentase nilai puas dan sangat puas pada layanan utama}_2 + \dots)}{n}$$

n = jumlah layanan utama

Survei tingkat kepuasan pada semester I tahun 2017 dilaksanakan sebelum penyelenggaraan rapat terbatas pada tanggal 31 Juli 2017 dengan jumlah responden sebanyak 34 orang. Survei dimaksud menunjukkan tingkat kepuasan peserta rapat terbatas terhadap 4 (empat) jenis layanan utama yang diberikan oleh Sekretariat Kabinet dengan hasil akumulasi persentase nilai puas dan sangat puas dari setiap layanan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.7. Jumlah Persentase Nilai Puas dan Sangat Puas Peserta Rapat Terbatas pada 4 Jenis Layanan Utama

No.	Layanan Utama	Jumlah Persentase Nilai Puas dan Sangat Puas Peserta Rapat Terbatas
1	Pelayanan informasi penyelenggaraan rapat terbatas	85,29%
2	Pelayanan sarana dan prasarana rapat terbatas	97,05%
3	Pelayanan penayangan paparan materi rapat terbatas	96,97%
4	Pelayanan pengelolaan risalah rapat terbatas	91,23%
	Rata-rata	92,64%

Target yang ditetapkan untuk IKU sasaran dua semester I pada tahun 2017 adalah 100%, tidak ada perbedaan dari tahun sebelumnya. Berdasarkan hasil survei, sampai dengan semester I tahun 2017 diperoleh realisasi dan capaian sebesar 92,64%. Grafik berikut ini menggambarkan target, realisasi, dan capaian IKU sasaran dua semester I tahun 2017.

Gambar 2.6. Target, Realisasi, dan Capaian IKU Sasaran Dua Semester I Tahun 2017



Berikut ini rangkuman saran dan masukan yang diberikan peserta sidang terkait pengelolaan persidangan kabinet.

Tabel 2.8. Saran dan Masukan terkait Pengelolaan Persidangan Kabinet

No.	Jenis Layanan	Saran dan Masukan
1	Informasi penyelenggaraan sidang kabinet	Rencana bulanan sidang kabinet/rapat terbatas perlu disusun yang sifatnya “by issue” berdasarkan prioritas agar kementerian terkait <i>less</i> reaktif dan lebih proaktif.
		Bidang-bidang yang akan dibahas dalam sidang kabinet/rapat terbatas sebaiknya diagendakan secara tetap setiap bulannya.
		Informasi penyelenggaraan sidang kabinet/rapat terbatas diharapkan dapat disampaikan lebih awal untuk persiapan peserta minimal 2 hari sebelum pelaksanaan sidang kabinet/rapat terbatas.
		Diharapkan ada kepastian tema yang akan dibahas dalam sidang kabinet/rapat terbatas.
		Setiap 6 bulan sekali sebaiknya diadakan sidang kabinet/rapat terbatas agar para kepala daerah dapat melaporkan kondisi daerahnya.
2	Sarana dan prasarana sidang kabinet	Tempat duduk sebaiknya diberikan jarak agak luas agar tidak berhimpitan satu dengan yang lainnya.
3	Penayangan paparan materi sidang kabinet	Bahan paparan sebaiknya dibagikan kepada peserta sebelum sidang dimulai sehingga peserta dapat berpartisipasi dengan lebih fokus.
4	Risalah sidang kabinet	Risalah hasil sidang kabinet/rapat terbatas diharapkan dapat diterima oleh Kementerian/Lembaga selambat-lambatnya 2-3 hari setelah pelaksanaan karena akan digunakan sebagai acuan/rujukan bagi Kementerian/Lembaga untuk menindaklanjuti arahan Presiden atas hasil sidang kabinet/rapat terbatas tersebut.
		Arahan Presiden tidak perlu semuanya dimasukkan dalam risalah sidang kabinet/rapat terbatas.
		Risalah sidang kabinet/rapat terbatas cukup dibuat dalam bentuk kolom dan poin-poin dalam risalah.
		Perlu evaluasi terhadap tindak lanjut pelaksanaan arahan Presiden oleh Kementerian/Lembaga yang dikordinasikan dan dimonitor pelaksanaannya oleh Sekretariat Kabinet.

Sekretariat Kabinet memiliki fungsi untuk menyiapkan, mengadministrasikan, menyelenggarakan, dan mengelola sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden agar dapat dilaksanakan dengan

efektif dan efisien. Dalam rangka memperlancar tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet dalam memberikan dukungan pengelolaan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyeleenggaraan pemerintahan, salah satu yang telah dilakukan untuk mendukung fungsi tersebut adalah ditetapkannya Keputusan Sekretaris Kabinet Nomor 13 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Unit Kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet tanggal 16 Februari 2017.

Standar Pelayanan pada unit kerja Sekretariat Kabinet tersebut meliputi ruang lingkup pelayanan administrasi, yang terdiri dari:

- a. Standar Pelayanan permohonan penjadwalan sidang kabinet maupun rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden;
- b. Standar Pelayanan permohonan salinan risalah sidang kabinet maupun rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden;
- c. Standar Pelayanan permohonan informasi hasil peliputan kegiatan kabinet dan Sekretaris Kabinet;
- d. Standar Pelayanan informasi publik.

Pengukuran keberhasilan dari pelaksanaan standar pelayanan ada pada IKU eselon I dan II di Kedeputan Bidang Dukungan Kerja Kabinet yang dilakukan pengukurannya dengan survei. Terdapat 7 (tujuh) jenis survei yang terkait dengan pelaksanaan standar pelayanan tersebut di atas, yaitu:

- a. Persentase kepuasan Sekretaris Kabinet terhadap pengelolaan sidang kabinet;
- b. Persentase kepuasan terhadap informasi terkait kegiatan Kabinet dan Sekretariat Kabinet yang disebarluaskan;
- c. Persentase kepuasan Sekretaris Kabinet terhadap penyelenggaraan persidangan kabinet;
- d. Persentase kepuasan terhadap layanan permohonan penjadwalan sidang kabinet;
- e. Persentase kepuasan Sekretaris Kabinet dan para Eselon I di lingkungan Sekretariat Kabinet terhadap hasil-hasil sidang kabinet;
- f. Persentase kepuasan terhadap pelayanan permohonan salinan risalah sidang kabinet; dan
- g. Persentase kepuasan terhadap pelayanan permohonan informasi hasil peliputan kegiatan Kabinet dan Sekretariat Kabinet.

Pelaksanaan survei tersebut ada yang ditujukan kepada pihak internal yaitu Sekretaris Kabinet dan para Eselon I di lingkungan Sekretariat Kabinet untuk mengetahui kepuasan pengelolaan persidangan secara keseluruhan dan penyelenggaraan persidangan, dan ada yang ditujukan kepada pihak eksternal yaitu *stakeholder* maupun publik yang dilayani dalam hal permohonan penjadwalan sidang, permohonan salinan risalah sidang, permohonan informasi hasil peliputan, dan informasi yang disebarluaskan melalui *website* setkab.go.id.

Selain pelaksanaan survei, Sekretariat Kabinet juga berupaya untuk meningkatkan kinerja terkait penyusunan risalah sidang kabinet atau rapat terbatas dengan merencanakan penyediaan alat *audio to text* (teknologi pengubah suara menjadi tulisan). Melalui pemanfaatan teknologi tersebut diharapkan dapat membantu percepatan penyusunan risalah sidang kabinet atau rapat terbatas. Pada tanggal 27 Februari 2017 dan 16 Maret 2017, Kedeputusan Bidang Dukungan Kerja Kabinet telah melakukan rapat koordinasi dengan mengundang PT. Bahasa Kinerja Utama dan PT. Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) guna mempresentasikan penggunaan teknologi mesin atau aplikasi dari bentuk suara ke dalam tulisan.

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap perbandingan antara PT. Bahasa Kinerja Utama dan PT. Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero), diputuskan bahwa alat *audio to text* yang ditawarkan oleh PT. Bahasa Kinerja Utama yang paling sesuai dengan kebutuhan Sekretariat Kabinet. Namun, pengadaan alat tersebut tidak dapat dilaksanakan di tahun 2017 karena keterbatasan anggaran. Pengadaan alat dimaksud akan dianggarkan pada tahun 2018 melalui mekanisme lelang, mengingat harga alat tersebut di atas Rp.200.000.000,00.



AKUNTABILITAS KEUANGAN SASARAN II

Anggaran yang diperjanjikan untuk mencapai sasaran strategis kedua termasuk di dalam alokasi anggaran pada program “Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam Penyelenggaraan Pemerintahan”, yaitu sebesar Rp.11.116.800.000,00. Tidak ada pemotongan terhadap anggaran tersebut sehingga jumlahnya tetap sama pada semester I tahun 2017. Target penarikan dana sampai dengan semester I tahun 2017 adalah sebesar Rp.5.558.400.000,00 dan terserap sebesar Rp.3.980.900.378,00 atau 35,83%. Jika dibandingkan dengan total anggaran sampai dengan akhir tahun maka penyerapan pada semester I tahun 2017 adalah 35,81%. Diharapkan pada semester II capaian kinerja dapat ditingkatkan serta pelaksanaan kegiatan dapat lebih optimal.

B. Capaian Lainnya



Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Sekretariat Kabinet Tahun 2016 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya Sekretariat Kabinet di tahun 2017 ini memperoleh penghargaan atas keberhasilan menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Tahun 2016 dengan capaian standar tertinggi. Menurut opini BPK,

Laporan Keuangan Sekretariat Kabinet, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Sekretariat Kabinet tanggal 31 Desember 2016, dan realisasi anggaran, operasional, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

C. Rekomendasi Laporan Kinerja Sekretariat Kabinet Tahun 2016 dan Tindak Lanjutnya

Upaya optimalisasi kinerja dalam pencapaian sasaran strategis Sekretariat Kabinet telah diidentifikasi pada LKj Sekretariat Kabinet Tahun 2016 sebagai rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti pada tahun 2017. Upaya perbaikan proses kerja mencerminkan keinginan Sekretariat Kabinet untuk mencapai sasaran strategis dengan hasil yang lebih berkualitas. Selanjutnya akan disajikan matriks yang berisi rekomendasi serta hal yang telah dimulai di tahun 2016 dan perlu dipantau tindak lanjutnya di tahun 2017 dalam upaya optimalisasi pencapaian target kinerja masing-masing IKU, dengan tindak lanjut yang telah dilaksanakan pada semester I tahun 2017.

Tabel 2.9. Rekomendasi per Indikator Kinerja Sasaran

Sasaran Strategis	Terwujudnya Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas
IKU 1	Persentase rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan yang dimanfaatkan
Rekomendasi dalam LKj Tahun 2016	Tindak Lanjut Tahun 2017
Kegiatan penyusunan rekomendasi, pengawasan, pemantauan, evaluasi, dan analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah difokuskan pada pelaksanaan kebijakan dan program yang menjadi prioritas nasional	<ul style="list-style-type: none"> • Sinergi Sekretariat Kabinet c.q Deputi Bidang Perekonomian dengan Kementerian PPN c.q Direktorat Evaluasi dan Pengawasan dalam rangka penyusunan laporan Evaluasi Paruh Waktu RPJMN 2015-2019 dan RKP 2018, antara lain dilakukan melalui kegiatan pemantauan ke daerah dan rapat koordinasi dengan K/L terkait serta bersinergi dengan K/L dibawah Kementerian Koordinasi (Kemenko) yang ada di Kabinet Kerja dalam penyusunan rencana kebijakan atau program pemerintah. • Kegiatan penyusunan rekomendasi, pengawasan, pemantauan, evaluasi, dan analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah terkait Program Strategis Nasional (PSN) serta bersama BAPPENAS melakukan monitoring dan evaluasi paruh waktu RPJMN 2015-2019 dan pemantauan RKP 2017, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> ○ Rapat rapat PSN; ○ Pemantauan revitalisasi pasar tradisional; ○ Program kehutanan sosial.

Rekomendasi dalam LKj Tahun 2016	Tindak Lanjut Tahun 2017
Peningkatan koordinasi dengan instansi terkait	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan koordinasi intensif dengan PIC atas K/L terkait, melalui forum diskusi formal (FGD) dan informal (kunjungan langsung ke K/L dan/atau institusi terkait) untuk membahas perkembangan isu tertentu, seperti R.Inpres Pengambilan, Pengawasan, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan • Melakukan inisiasi Rapat Koordinasi terkait Rencana Pemantauan Perkembangan Kawasan Industri Nasional bersama Sekretaris Direktur Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri, Kementerian Perindustrian
Peningkatan kualitas tata laksana, pengembangan manajemen pengadministrasian persuratan berbasis teknologi informasi yang terintegritas	<ul style="list-style-type: none"> • Pembahasan evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan SOP unit kerja di lingkungan Setkab, dan Pembahasan SOP SITAP; • Rapat Pembahasan RPerseskab tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Internal di Lingkungan Sekretariat Kabinet;
	<ul style="list-style-type: none"> • Terobosan di Kedeputian Perekonomian yang patut diterapkan juga di kedeputian lainnya: <ul style="list-style-type: none"> - Penggunaan sistem persuratan di lingkungan Kedeputian Bidang Perekonomian yang dilengkapi dengan <i>early warning system</i>; • Pemberitahuan secara berkala kepada seluruh Eselon II di lingkungan Kedeputian Bidang Perekonomian terhadap surat-surat masuk yang belum terselesaikan.
Peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam penyusunan kajian, rekomendasi, dan analisis, serta teknik evaluasi kebijakan dan program pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan Diklat Analisa Kebijakan; • Pelaksanaan Diklat Perumusan Kebijakan; • Diklat Ekonomi Makro; • Diklat Penyusunan Infografis; • Pelaksanaan FGD Internal; • Keikutsertaan dalam seminar, <i>conference</i>, <i>workshop</i> dalam negeri/luar negeri; • <i>Sit-in class</i> di FH-UI; • <i>Sit-in class</i> di FEB UI (S2).
Peningkatan pengelolaan anggaran melalui koordinasi internal yang lebih intensif dan penyusunan standar pengelolaan dan pelayanan anggaran	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan Keputusan Deputi Bidang Administrasi Nomor: KEP.6/ADM/I/2017 tentang Satuan Biaya Pelayanan/Kegiatan di Lingkungan Sekretariat Kabinet; • Pendampingan/penelaahan RAB dengan Biro Perencanaan dan Keuangan; • Pelaksanaan rapat koordinasi internal dalam rangka pembahasan pengelolaan anggaran (penyusunan, revisi, penyerapan); • Diklat Bendahara dan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ).

IKU 2	Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan yang dimanfaatkan
Rekomendasi dalam LKj Tahun 2016	Tindak Lanjut Tahun 2017
Memperbaiki mekanisme koordinasi dan kerja sama dengan K/L, Pemerintah Daerah, dan <i>stakeholder</i> lainnya	Melakukan koordinasi intensif dengan PIC atas K/L terkait, perangkat Pemerintah Daerah, dan <i>stakeholders</i> lainnya melalui forum diskusi formal (FGD) dan informal (kunjungan langsung ke K/L dan/atau institusi terkait) serta pemantauan lapangan untuk membahas perkembangan isu tertentu.
Meningkatkan kompetensi SDM dengan mengikutsertakan dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan substansi penyusunan RPUU	<ul style="list-style-type: none"> • Diklat analisis kebijakan; • Diklat perumusan kebijakan; • Diklat <i>legal drafting</i>.
Meningkatkan kemampuan analisis substansi dari RPUU yang diajukan dengan ikut serta dalam rapat koordinasi, seminar, FGD, dan forum-forum semacamnya	<ul style="list-style-type: none"> • Menjadi anggota Panitia Antar Kementerian dan/atau Antar Nonkementerian Dalam Rangka Penyusunan RPUU; • Mengikuti rapat/seminar/FGD terkait RPUU di berbagai bidang; • <i>Sit-in class</i> di FH-UI; • FGD Internal.
IKU 3	Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden yang dimanfaatkan
Rekomendasi dalam LKj Tahun 2016	Tindak Lanjut Tahun 2017
Pelaksanaan SE.1/Seskab/VII/2016 tentang Prosedur Persiapan dan Penyampaian Bahan Sidang Kabinet/Rapat Terbatas	<ul style="list-style-type: none"> • Optimalisasi dalam penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan Presiden melalui penyelenggaraan Rapat Koordinasi Pra Ratas Sidang Kabinet dengan mengundang K/L terkait serta Pemerintah Daerah dan berkoordinasi dengan kedeputian substansi lainnya; • Penyampaian <i>briefing sheet</i> Ratas yang meliputi antara lain berisikan usulan arahan Presiden dalam bentuk matriks dan penyampaian infografis.
Sasaran Strategis	Terwujudnya Pengelolaan Persidangan Kabinet yang Berkualitas
IKU	Persentase tingkat kepuasan peserta sidang kabinet terhadap pengelolaan sidang kabinet
Rekomendasi dalam LKj Tahun 2016	Tindak Lanjut Tahun 2017
Penyusunan Standar Pelayanan Publik dan Pelaksanaannya	Pada tanggal 16 Februari 2017 telah ditetapkan Keputusan Sekretaris Kabinet Nomor 13 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Unit Kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet

Rekomendasi dalam LKj Tahun 2016	Tindak Lanjut Tahun 2017
Penggunaan <i>security paper</i> dalam penyusunan dan pendistribusian dokumen risalah maupun Arahan Presiden	<i>Security paper</i> telah digunakan dalam penyusunan dokumen risalah. Pengadaannya di tahun 2017 dilakukan dengan pengadaan langsung karena terdapat kebijakan baru dalam penyusunan dokumen risalah sehingga kebutuhan <i>security paper</i> di tahun 2017 tidak sebanyak tahun sebelumnya dan tidak perlu diadakan melalui lelang.
Pembangunan <i>security network</i> pendistribusian hasil Sidang Kabinet	Pembangunan <i>secure chat</i> dan <i>secure email</i> untuk pengamanan terhadap sarana komunikasi dalam rangka penyelenggaraan persidangan kabinet bekerja sama dengan Lembaga Sandi Negara yang sekarang telah berubah menjadi Badan Siber dan Sandi Negara. Uji coba alat pengamanan dilakukan selama 4 (empat) bulan dan akan dievaluasi pada semester kedua.

Berdasarkan identifikasi permasalahan pada tahun 2016, Sekretariat Kabinet menentukan upaya-upaya apa yang harus dilakukan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi.

1. Penguatan sistem dan teknologi informasi dalam mendukung proses kerja yang lebih efektif dan efisien baik yang ditujukan untuk proses kerja internal maupun yang berhubungan dengan *stakeholder*.

Pada semester I tahun 2017 Sekretariat Kabinet telah berusaha untuk memperbaiki dan menyempurnakan sistem dan teknologi informasi dalam mendukung proses kerja supaya lebih efektif dan efisien, yaitu dengan menyempurnakan SITAP dan mengembangkannya tidak hanya berfungsi untuk memonitor tindak lanjut arahan Presiden, tetapi juga memonitor tindak lanjut rekomendasi dari laporan kunjungan luar negeri Menteri maupun Pimpinan Lembaga dan memantau posisi RPUU.

2. Memperkuat kemampuan manajerial kabinet, hal-hal yang menyangkut substansi dari pemerintahan, yaitu mengelola, mengendalikan dan mengharmonisasikan kabinet. Fokus kepada deregulasi dan permasalahan pembangunan infrastruktur. Perihal deregulasi masih memerlukan banyak pembenahan. Sekretariat Kabinet menggodok peraturan perundang-undangan yang ada, intinya secara prinsip membuat semua aturan itu transparan, mudah, kredibel, mempunyai kepastian hukum, gampang diakses, dan yang tidak kalah penting adalah mudah diimplementasikan.

Penguatan kemampuan manajerial kabinet sangat berhubungan erat dengan kemampuan SDM dalam menganalisis permasalahan yang dihadapi dan perlu wawasan yang luas, mendalami substansi sesuai bidangnya oleh karena itu SDM dituntut untuk terus menggali informasi dan pengetahuan sehingga dapat mumpuni di bidangnya. SDM diberi kesempatan untuk mendapatkan pengalaman dan pengetahuan melalui pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan serta

keikutsertaan dalam seminar, konferensi, dan *workshop* dalam negeri maupun luar negeri.

Kesempatan tersebut membuka peluang SDM Sekretariat Kabinet untuk bertemu dengan pegawai atau rekan dari kementerian/instansi lain atau perwakilan dari negara lain sehingga dapat saling bertukar informasi, mengetahui *best-practice* dan melakukan *benchmark*.

3. Pelaksanaan Rencana Kerja Reformasi Birokrasi (RB) tahun 2017 dengan komitmen penuh dari seluruh Pimpinan dan pegawai Sekretariat Kabinet sehingga target tercapai sesuai jadwal.

Rencana Kerja RB Sekretariat Kabinet tahun 2017 ditetapkan melalui Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja (*Work Plan*) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Sekretariat Kabinet Republik Indonesia Tahun 2017, yang ditetapkan pada tanggal 1 Maret 2017. Pelaksanaan rencana kerja tersebut dimonitor dan dievaluasi oleh Deputi Bidang Administrasi c.q. Biro Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi yang hasilnya dilaporkan secara semesteran kepada Sekretaris Kabinet dan seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet.

D. Kendala dan Hambatan yang Dihadapi Sekretariat Kabinet

Peran Sekretariat Kabinet dalam manajemen kabinet sangat membutuhkan kemampuan koordinasi dan komunikasi yang baik dan intens dengan K/L maupun pemangku kepentingan terkait untuk memudahkan pengumpulan dan pengolahan data serta informasi yang dibutuhkan. Semakin cepat dan akurat data diperoleh maka rekomendasi yang dihasilkan akan semakin berkualitas, kendala waktu bisa mengurangi kualitas rekomendasi, apabila penyampaian rekomendasi terlambat dapat menyebabkan rekomendasi itu tidak dapat digunakan oleh *stakeholder* atau menjadi tidak bermanfaat. Oleh karena itu faktor utama yang penting adalah SDM yang memadai baik dari sisi kualitas maupun kuantitas. Koordinasi dan pemantauan membutuhkan SDM, sampai dengan semester I tahun 2017 terdapat posisi pejabat struktural di kedeputian substansi yang kosong sebanyak 35 posisi dan staf jabatan fungsional umum yang ada sebanyak 53 orang. Berdasarkan pemetaan formasi dan jabatan masih dibutuhkan sebanyak 233 staf jabatan fungsional umum.

Beberapa pedoman atau pun SOP yang belum dimiliki Sekretariat Kabinet guna mendukung penyusunan rekomendasi dan kinerja yang lebih baik, di antaranya adalah:

- a. Pedoman penyusunan rekomendasi yang berkualitas;
- b. Pedoman monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan arahan Presiden, pedoman peninjauan lapangan; serta
- c. SOP internal antar kedeputian substansi tentang mekanisme pelaksanaan penyiapan bahan terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Selain pedoman, dibutuhkan sarana prasarana teknologi informasi guna memperoleh data yang lebih akurat dan cepat. Sistem informasi untuk memantau rekomendasi kebijakan dapat diakomodir dengan sistem informasi persuratan yang terintegrasi baik di internal Sekretariat Kabinet dan sebaiknya dapat terintegrasi dengan sistem persuratan Sekretaris Presiden (Sespri), sehingga pemanfaatan rekomendasi dapat terpantau dengan baik. Saat ini Sekretariat Kabinet sedang membangun Sistem Informasi Persuratan Terpadu (SIPT) namun masih dalam tahap pengembangan dan penyempurnaan, belum diujicobakan di kedeputian substansi.

Diidentifikasi juga bahwa dalam pelaksanaan manajemen kabinet Perpres Nomor 25 Tahun 2015 tentang Sekretariat Kabinet tidak sepenuhnya berjalan dengan baik sehingga diperlukan payung hukum Perpres tentang Manajemen Kabinet. Payung hukum tersebut dibutuhkan untuk memperjelas kuasa atau wewenang Sekretariat Kabinet untuk memantau tindak lanjut rekomendasi ataupun arahan Presiden serta memperjelas peran Sekretariat Kabinet dalam perancangan PUU.

BAB III PENUTUP

Pada semester I tahun 2017 capaian Sekretariat Kabinet sebesar 97,45%. Capaian tersebut merupakan hasil rata-rata capaian seluruh IKU Sekretariat Kabinet yang telah diperjanjikan di awal tahun. Dalam mengatasi setiap permasalahan yang terjadi pada tahun 2017, Sekretariat Kabinet mengedepankan kerja sama yang baik antar seluruh unit kerja di Sekretariat Kabinet, Sekretariat Kabinet terus berupaya melakukan perbaikan. Sekretariat Kabinet perlu melakukan identifikasi langkah-langkah perbaikan yang akan dilakukan ke depan. Pemetaan risiko setiap unit kerja di Sekretariat Kabinet perlu dilakukan sebagai

satu langkah awal untuk memperbaiki kondisi internal Sekretariat Kabinet. Hasil pemetaan tersebut dapat dijadikan panduan bagi Sekretariat Kabinet untuk meminimalisir risiko yang dapat mengganggu kinerja organisasi.

Pada semester I ini telah diupayakan menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi Kementerian PAN dan RB yang disampaikan melalui Surat Nomor B/550/M.AA.05/2017 perihal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016 yaitu Sekretariat Kabinet sudah melakukan *cascading* kinerja secara berjenjang mulai dari eselon I sampai eselon II, namun Sekretariat Kabinet belum melakukan penjabaran kinerja sampai dengan eselon IV, sehingga belum terlihat secara nyata kontribusi kinerja yang terukur dari setiap jenjang jabatan terhadap pencapaian kinerja level di atasnya. Pada Januari 2017 telah ditetapkan PK sampai dengan eselon IV.



“Tanpa membangun sistem, Sekretariat Kabinet ini juga pasti akan kedodoran. Tidak bisa ada satu orang yang terlalu dominan dalam organisasi-organisasi yang seperti ini”
-Sekretaris Kabinet-

Pengembangan selanjutnya adalah membangun sistem untuk memonitor capaian kinerja sampai dengan eselon IV dengan mengembangkan SIMONJA menjadi Sistem Informasi Kinerja Terpadu (SIKT), yang rencananya juga akan diintegrasikan dengan sistem keuangan untuk memantau

realisasi anggaran yang digunakan untuk mendukung kinerja.

LAMPIRAN

- Lampiran 1 **MATRIKS CAPAIAN KINERJA
SEKRETARIAT KABINET SEMESTER I TAHUN 2017**
- Lampiran 2 **PENYERAPAN ANGGARAN
SEKRETARIAT KABINET SEMESTER I TAHUN 2017**
- Lampiran 3 **PENGEMBANGAN KAPASITAS SUMBER DAYA
MANUSIA SEKRETARIAT KABINET SEMESTER I
TAHUN 2017**

LAMPIRAN 1 MATRIKS CAPAIAN KINERJA SEKRETARIAT KABINET SEMESTER I TAHUN 2017

Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja			Program	Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian		Pagu	Realisasi	%
Terwujudnya Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas	Persentase rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintah yang dimanfaatkan	100%	98,99%	98,99%	Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	Rp.14.751.069.000,00	Rp.6.623.011.814,00	44,90%
	Persentase rekomendasi persetujuan atas izin prakarsa dan substansi rancangan PUU yang dimanfaatkan	100%	99,32%	99,32%				
	Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden yang dimanfaatkan	100%	98,83%	98,83%				
Terwujudnya Pengelolaan Persidangan Kabinet yang Berkualitas	Persentase tingkat kepuasan peserta sidang kabinet terhadap pengelolaan sidang kabinet	100%	92,64%	92,64%	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Kabinet	Rp.11.116.800.000,00	Rp.3.980.900.378,00	35,81%

LAMPIRAN 2 PENYERAPAN ANGGARAN SEKRETARIAT KABINET SEMESTER I TAHUN 2017

Anggaran Sekretariat Kabinet Tahun 2017: Rp.214.679.229.000,00

UNIT KERJA	PAGU ANGGARAN	PENYERAPAN	PERSENTASE PENYERAPAN
Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	3.822.328.000	1.528.315.107	39,98%
Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri	1.019.040.000	335.627.343	32,93%
Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara	919.916.000	369.712.267	40,18%
Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional	1.012.556.000	497.798.371	49,16%
Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika	870.816.000	325.177.126	37,34%
Deputi Bidang Perekonomian	3.835.296.000	1.327.306.134	34,60%
Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha	917.136.000	197.394.089	21,52%
Asisten Deputi Bidang Perniagaan, Kewirausahaan, dan Ketenagakerjaan	1.083.888.000	505.823.845	44,66%
Asisten Deputi Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, dan Industri	917.136.000	163.515.266	17,82%
Asisten Deputi Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, Lingkungan Hidup, dan Kehutanan	917.136.000	460.572.934	50,21%
Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	3.358.200.000	1.682.319.135	50,09%
Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga	917.136.000	458.956.270	50,04%
Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	815.232.000	422.346.022	51,80%
Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	810.600.000	471.852.031	58,21%
Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	815.232.000	329.164.812	40,37%
Deputi Bidang Kemaritiman	3.735.245.000	2.085.071.438	55,82%
Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan	861.030.000	583.294.992	67,74%
Asisten Deputi Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	1.150.202.000	658.784.496	57,27%
Asisten Deputi Bidang Perhubungan	859.933.000	359.010.100	41,74%
Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim	864.080.000	483.981.850	56,01%
Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet	11.116.800.000	3.980.900.378	35,83%
Asisten Deputi Bidang Pelaporan Persidangan	1.852.800.000	687.267.060	37,09%
Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan	3.705.600.000	1.292.926.702	34,89%
Asisten Deputi Bidang Hubungan Masyarakat dan Protokol	2.779.200.000	1.459.958.116	52,53%
Asisten Deputi Bidang Naskah dan Terjemahan	2.779.200.000	540.748.500	19,45%
Deputi Bidang Administrasi	154.205.303.000	64.657.959.588	41,92%
Biro Perencanaan dan Keuangan	2.160.768.000	761.984.300	35,26%
Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Tata Laksana	114.032.800.000	52.618.420.058	46,14%
Biro Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi	5.932.667.000	1.176.060.374	19,82%

LAMPIRAN 2 PENYERAPAN ANGGARAN SEKRETARIAT KABINET SEMESTER I TAHUN 2017

UNIT KERJA	PAGU ANGGARAN	PENYERAPAN	PERSENTASE PENYERAPAN
Biro Umum	32.079.068.000	10.101.494.856	31,49%
Inspektorat	1.158.000.000	389.923.406	33,67%
Pusat Data dan Teknologi Informasi	8.350.103.000	411.856.440	4,93%
Staf Khusus Presiden	10.653.600.000	2.390.063.515	22,44%
Staf Khusus Wakil Presiden	2.779.202.000	181.818.150	6,54%
Utusan Khusus Presiden	5.725.152.000	1.331.584.448	23,25%
Dana Operasional Sekretaris Kabinet dan Utusan Khusus Presiden	5.940.000.000	2.896.337.000	48,75%
TOTAL	214.679.229.000	82.863.454.739	38,61%

Rincian anggaran yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat Kabinet Tahun 2017:

SASARAN UNIT KERJA	PAGU ANGGARAN	PENYERAPAN	PERSENTASE PENYERAPAN
Terwujudnya Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas	14.751.069.000	6.623.011.814	44,90%
Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	3.822.328.000	1.528.315.107	39,98%
Deputi Bidang Perekonomian	3.835.296.000	1.327.306.134	34,60%
Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	3.358.200.000	1.682.319.135	50,09%
Deputi Bidang Kemaritiman	3.735.245.000	2.085.071.438	55,82%
Terwujudnya Pengelolaan Persidangan Kabinet yang Berkualitas	11.116.800.000	3.980.900.378	35,81%
Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet	11.116.800.000	3.980.900.378	35,83%
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Kabinet	163.713.406.000	65.459.739.434	39,98%

**LAMPIRAN 3 PENGEMBANGAN KAPASITAS SUMBER DAYA
MANUSIA SEKRETARIAT KABINET
SEMESTER I TAHUN 2017**

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS DAN FUNGSIONAL				
NO.	DIKLAT	PESERTA		WAKTU & PENYELENGGARAAN
1.	Pelatihan Pejabat Pembuat Komitmen	1.	Komarudin, S.AP.	13 s.d. 17 Februari 2017 (Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan, Jl. Raya Puncak KM, 72 Gadog, Megamendung, Bogor, Jawa Barat)
		2.	Dhany Kurniawan Pamungkas, S.Kom., M.Si	27 Februari s.d. 3 Maret 2017 (Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan, Jl. Raya Puncak KM, 72 Gadog, Megamendung, Bogor, Jawa Barat)
2.	Pelatihan BP/BPP	1.	Avip Suchron Nur H., S.Sos., M.H.	13 s.d. 17 Februari 2017 (Balai Diklat Keuangan Pontianak, Pusdiklat AP)
		2.	Dewi Wulansari, S.AP.	
		3.	Remelan	
		4.	M. Eky Marzuki, S.E.	5 s.d. 9 Juni 2017 (Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan, Jl. Raya Puncak KM, 72 Gadog, Megamendung, Bogor, Jawa Barat)
3.	<i>Office Management</i>		Sandra Dyta Meilinda	1 s.d. Februari 2017 (PPM Management, Jalan Menteng Raya Nomor 9, Jakarta Pusat)
4.	<i>Psychology at Work</i>	1.	Chairul Saleh, S.H., LL.M.	Inti Pesan, di Bandung
		2.	Heri Riyani	
		3.	Johan Kurniawan, S.Sos.	
		4.	Dien Listyarini, S.AP.	
5.	<i>Workshop on Key Aspects of Good Regulatory Practice</i>	1.	Oktavio Nugrayasa, S.E., M.Si.	15 s.d. 16 Maret 2017 (Kementerian Perdagangan, Ruang Auditorium, Gedung Utama, Lantai 1, Jalan M.I. Ridwan Rais No. 5, Jakarta Pusat)
		2.	Bayu Seta Aji, S.IP., M.Int.Rel.	
		3.	Hermawan Susanto, S.H.	
		4.	Ronald Sofyan Ganda Sari Sipayung, S.E., M.M., MEconPP.	
		5.	Susanti, S.E., M.A.	
		6.	Aprizal, S.IP.	
		7.	Sofyan Apendi, S.H.	
		8.	Dewi Purwaningsih, S.Sos.	
		9.	Buheti, S.H.	
		10.	Andrian Fauzi, S.I.A.	

**LAMPIRAN 3 PENGEMBANGAN KAPASITAS SUMBER DAYA
MANUSIA SEKRETARIAT KABINET
SEMESTER I TAHUN 2017**

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS DAN FUNGSIONAL				
NO.	DIKLAT	PESERTA		WAKTU & PENYELENGGARAAN
		11.	Muhammad Agvian Megantara, S.H.	
		12.	Difa Giovani Anggasta Sari, S.E.	
		13.	Mela Meilania, S.AP.	
6.	<i>Workshop</i> Pengelolaan Media dan Promosi KSS Indonesia	1.	Edi Nurhadiyanto, S.S., M.Si	21 s.d. 22 Maret 2017 (Biro KTLN, The Akmani Hotel, Jakarta)
		2.	Deni Setiadhi, S.Kom.	
		3.	Dindha Cahyoening Moerti, S.Ikom.	
7.	Penyusunan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa	1.	Dikri Faisal, S.H.	20 s.d. 24 Maret 2017 (Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan, Jl. Raya Puncak KM, 72 Gadog, Megamendung, Bogor, Jawa Barat)
		2.	Ida Bagus Putu Santika, S.Kom.	
9.	<i>Bimtek Legislative Drafting</i> “Kebijakan dan Regulasi” (Batch ke-1)	1.	Alifa Rahmat Syukri, S.H., M.H.	29 Maret s.d. 4 April 2017 (Swakelola, di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta)
		2.	A. Bayu Wiraditya Pawi, S.H.Int.	
		3.	Erick Mario, S.H., M.H.	
		4.	Fauziana Nurul Aini, S.IP., M.A.	
		5.	Novilia Mayasari, S.IP, MA.	
		6.	Irawati, S.IP.	
		7.	Raden Fasyah Khalil Gibran, S.H.	
		8.	Ari Khusrini, S.AP.	
		9.	Isnen Eko Darsana, S.E.	
		10.	Sobirin, S.Sos.	
		11.	Izzatul Ulfi Sarinastiti, S.E.	
		12.	Prima Mashita Patriotika, S.E., M.Si.	
		13.	Winarti, S.I.P.	
		14.	Tri Eka Sunarti Dewi, S.IP.	
		15.	Titin Sri Haryanti, S.H.	
		16.	Sofyan Apendi, S.H.	
		17.	Ika Narwidya Putri, S.I.A.	
		18.	M. Ribai Subhandana, S.E.	
		19.	Casnata, SH.	
		20.	Dessy Dwi Astuty, S.H., M.Kn.	
		21.	Hendrawan, S.E.	

**LAMPIRAN 3 PENGEMBANGAN KAPASITAS SUMBER DAYA
MANUSIA SEKRETARIAT KABINET
SEMESTER I TAHUN 2017**

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS DAN FUNGSIONAL			
NO.	DIKLAT	PESERTA	WAKTU & PENYELENGGARAAN
		22. Ricky Wulan Noviyanthi, S.AP.	
		23. Aqif Mahendra, S.E.	
		24. Manda Kumoro Saraswati, S.E.	
		25. Syahrion Teridel, S.Sos., M.Si.	
		26. Trijaka, S.AP.	
		27. Widya Dwi Lestari, A.Md.	
		28. Kustoro, S.AP.	
		29. Bella Nathania	
10.	Bimtek <i>Legislative Drafting</i> "Kebijakan dan Regulasi" (Batch ke-2)	1. Retno Wulandari, S.H., M.H.	13 s.d. 21 April 2017 (Swakelola, di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta)
		2. Wening Hapsari Ma'rifatullah, S.IP.	
		3. Nurul Hani Pratiwi, S.H.	
		4. Muhamad Erwin Mulyana, S.IP, M.Pub.Pol	
		5. Emmi Elisabeth P. Panggabean, S.E., M.Ec.	
		6. Ririn Yanuar Megawati, S.IP.	
		7. Rindang Mawardani, S.E., MPA.	
		8. Susanti, S.E., M.A.	
		9. Gunawan, S.AP.	
		10. Doni Septo, S.IP, M.AP.	
		11. Puji Wisudya Rakhmawati, S.E.	
		12. Ramos, S.E.	
		13. Rumani Hastuti, S.H.	
		14. Ety Yuliaty, S.Sos., M.M.	
		15. Endry Risman, S.E.	
		16. Heru Wibowo, S.E., M.Si.	
		17. Wulan Nugraheni, S.H.	
		18. Muhammad Agvian Megantara, S.H.	
		19. Wina Aprilita, S.Kom., M.A.	
		20. Suryani, S.Psi., M.Si.	
		21. Benni Kusriyadi, S.ST	
		22. Widya Krishnawati, S.E.	
		23. Elli Ristika, S.E.	

**LAMPIRAN 3 PENGEMBANGAN KAPASITAS SUMBER DAYA
MANUSIA SEKRETARIAT KABINET
SEMESTER I TAHUN 2017**

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS DAN FUNGSIONAL				
NO.	DIKLAT	PESERTA		WAKTU & PENYELENGGARAAN
		24.	Indira Ahdiyanti Utami, S.H.	
		25.	Henny Navilah, S.H., LL.M.	
		26.	Henny Galla Pradana, S.H.	
		27.	Lucianasari, S.E.	
		28.	Henni Verawati, S.E.	
		29.	Efraim Jordi Kastanya	
11.	Seleksi Diklat <i>Reform Leader Academy</i>	1.	Asri Ernawati, S.H., M.H.	30 Maret s.d. 1 April 2017 (Lembaga Administrasi Negara, Jln Administrasi II, Pejompongan, Jakarta)
		2.	Hendry Prihandono, S.Kom., M.Kom.	
		3.	M. Faisal Yusuf, S.IP, M.Si.	
		4.	Mita Apriyanti, S.Sos., M.Si.	
12.	<i>Workshop</i> Pengelolaan Tata Laksana dan SOP yang Efektif		Eny Nur'ani	30 s.d. 31 Maret 2017 (AG Indonesia, di Hotel Grand Mercure, Jalan Hayam Wuruk No. 36 - 37, Jakarta)
13.	Studi Banding Pojok Konseling	1.	Heri Riyani	9 s.d. 12 April 2017 (BKD Sleman, Yogyakarta)
		2.	Elizabeth D Simanjuntak, S.H., M.H.	
14.	Seminar Manajemen Kinerja untuk Generasi Milenial		Chairul Saleh, S.H., LL.M.	12 April 2017 (PPM Manajemen Jakarta)
15.	<i>Soul of Speaking for Prime</i>	1.	Ida Dwi Nilasari, S.H., M.H.	24 s.d. 27 April 2017 (di Belitung)
		2.	Diana Irawati, S.H., LL.M.	
		3.	M. Hamidi, S.H., M.A.	
		4.	Dra. Rahayu Kadarwati, M.Si.	
		5.	Chairul Saleh, S.H., LL.M.	
		6.	Elizabeth D Simanjuntak, S.H., M.H.	
		7.	Tonny Hermawan, S.E.	
		8.	Suryani, S.Psi., M.Si.	
		9.	Syahrion Teridel, S.Sos. M.Si.	
		10.	Dra. Suparti, M.AP.	
16.	Analisis dan Penyusunan Laporan Keuangan	1.	Lasny Rohaya Natalina S., S.E., M.E.	25 s.d. 27 April 2017 (Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan, Jl. Raya Puncak KM, 72 Gadog, Megamendung, Bogor, Jawa Barat)
		2.	Ratih Noviantini, A.Md.	
		3.	Ayu Yulian Anjani, A.Md.	

**LAMPIRAN 3 PENGEMBANGAN KAPASITAS SUMBER DAYA
MANUSIA SEKRETARIAT KABINET
SEMESTER I TAHUN 2017**

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS DAN FUNGSIONAL				
NO.	DIKLAT	PESERTA		WAKTU & PENYELENGGARAAN
		4.	Annisa Media Febriani, A.Md.	
17.	Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja		Zahrotul Addawiyah Iskandar, S.Sos.	25 s.d. 29 April 2017 (Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan, Jl. Raya Puncak KM, 72 Gadog, Megamendung, Bogor, Jawa Barat)
18.	Pelatihan Teknisi Komputer	1.	Harry Septyono Rahmadi, S.Kom., M.M.	2 s.d. 6 Mei 2017 (Be Logic, Gedung Labora Bandung Jawa Barat)
		2.	Zunizan Putra Suci Pratama	
		3.	Luky Fauzan	
		4.	Ida Bagus Putu Santika, S.Kom	16 s.d. 20 Mei 2017 (Be Logic, Gedung Labora Bandung Jawa Barat)
		5.	Boogie Dwi Nugraha Putra	
19.	Great Coaching & Counselling	1.	Heru Priyantono, S.H.	9 s.d. 13 Mei 2017 (Insan Performa, Makasar)
		2.	Al Furkon Setiawan, S.H., S.Sos., M.Si.	
		3.	Drs. Islachuddin, M.Si.	
		4.	Yulyati Kristina, S.Sos., M.Si.	
		5.	Alifa Rahmat Syukri, S.H., M.H.	
		6.	Fauziana Nurul Aini, S.IP., M.A.	
		7.	Djaka Warsijanto, S.Sos., M.Ak.	
		8.	Lisnayni Rochmatu Sakdiyah, S.IP., M.PP.	
		9.	Dra. Suparti, M.AP.	
		10.	Hendry Prihandono, S.Kom., M.Kom.	
		11.	Suryani, S.Psi., M.Si.	
		12.	Harry Septyono Rahmadi, S.Kom., M.M.	
		13.	Joko Hari Yanto, S.Sos.	
		14.	Prama Putri Iswari, S.AP.	
		15.	Enggartias Wahana Putera, S.Sos.	
		16.	Selvia Apriliana, S.I.A.	
		17.	Eny Nur'aini, S.AP.	
		18.	Elizabeth Dumora S., S.H., M.H.	
		19.	Dien Listyarini, S.AP.	
		20.	Tonny Hermawan, S.E.	

**LAMPIRAN 3 PENGEMBANGAN KAPASITAS SUMBER DAYA
MANUSIA SEKRETARIAT KABINET
SEMESTER I TAHUN 2017**

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS DAN FUNGSIONAL				
NO.	DIKLAT	PESERTA		WAKTU & PENYELENGGARAAN
20.	Diklat Teknis Pengelolaan Arsip Aktif	1.	Arief Setia Budi, S.AP.	15 s.d. 19 Mei 2017 (Pusdiklat Kearsipan ANRI, Bogor, Jawa Barat)
		2.	Nana Karna	
		3.	Dwi Riadi	
21.	Diklat Teknis Pengelolaan Arsip Inaktif	1.	Arief Setia Budi, S.AP.	9 s.d. 13 Juli 2017 (Pusdiklat Kearsipan ANRI, Bogor, Jawa Barat)
		2.	Nana Karna	
		3.	Dwi Riadi	
22.	Diklat <i>Reform Leader Academy</i>	1.	Mita Apriyanti, S.Sos., M.Si.	22 Mei s.d. 3 Oktober 2017 (PKPA III LAN Samarinda, Kalimantan Timur)
		2.	Hendry Prihandono, S.Kom., M.Kom.	
25.	Cost and Benefit Analysis	1.	Syahrion Teridel, S.Sos., M.Si.	24 s.d. 27 Juli 2017 (BPHN, di Kedutaan Besar Inggris)
		2.	Erick Mario, S.H., M.H.	
		3.	Puji Wisudya Rakhmawati, S.E.	
		4.	Wina Aprilita, S.Kom., M.A.	
		5.	Muhammad Hilmansyah, S.E.	
26.	<i>Creativity & Innovation</i>	1.	Yunita Tri Nurhayati, S.E., M.M.	2 s.d. 3 Agustus 2017 (PT. Inti Pesan, Hotel Santika Jakarta)
		2.	Dien Listyarini, S.AP., S.E.	
27.	Rekrutmen dan Pengembangan Professional Global Talent Indonesia	1.	Elizabeth Dumora S., S.H., M.H.	9 Agustus 2017 (PPM Manajemen Jakarta)
		2.	Femita Adriyanti, S.H.	
28.	<i>Soul of Speaking for STAR</i>	1.	Pratama Hadi Saputra, A.Md.	13 s.d. 14 Mei 2017 (Graha Phinastika, Lebak Bulus, Jakarta)
		2.	Novia Budhi Astri Tarigan	
		3.	Siska	
		4.	Nurul Khoiriyah	
		5.	Taufik Saleh	
		6.	Syafrizal	
		7.	Iksan Candra Buana Putera	
		2.	Djaka Warsijanto, S.Sos., M.Ak.	
		3.	Sukarso, S.Sos.	
		4.	Bagas Putranto, S.Ikom., S.H.	
		5.	Adnan, S.Sos.	
		6.	Asri Ernawati, S.H., M.H.	
		7.	Connie Pawitasari, S.IP.	

**LAMPIRAN 3 PENGEMBANGAN KAPASITAS SUMBER DAYA
MANUSIA SEKRETARIAT KABINET
SEMESTER I TAHUN 2017**

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN STRUKTURAL				
NO.	DIKLAT	PESERTA		WAKTU & PENYELENGGARAAN
1.	Diklatpim Tk. II	1.	Dyah Pancaningrum, S.H., MT.Dev.	28 Februari s.d. 16 Juni 2017 (Pusdiklat Kepemimpinan Aparatur Nasional - LAN, Jalan Administrasi II, Pejompongan, Jakarta)
		2.	Johar Arifin, S.IP., M.P.M.	18 Juli s.d. 10 November 2017 (Pusdiklat Kepemimpinan Aparatur Nasional - LAN, Jalan Administrasi II, Pejompongan, Jakarta)
		3.	Dyah Kusumastuti, S.H., LL.M.	
2.	Diklatpim Tk. IV	1.	Hermawan Susanto, S.H.	10 April s.d. 11 Agustus 2017 (Pusdiklat Kemensetneg)
		2.	Aprilian Winata, S.H., M.H.	
		3.	Sri Retno Ardiennyngtyas, A.Md.	
3.	Diklatpim Tk. III	1.	Agus Kurniawan, S.H., LL.M.	25 April s.d. 11 Agustus 2017 (Pusdiklat BPK RI)
		2.	Vito Prihartono, S.H.	
		3.	Sugeng Raharjo, S.H., M.M.	
		4.	Asep Deni Herdiana, S.E.	24 Juli s.d. 9 November 2017 (Pusdiklat Kemensetneg)
		5.	Alifa Rahmat Syukri, S.H., M.H.	
		6.	Ety Yuliaty, S.Sos., M.M.	
		7.	Ina Kurniawati, S.E.	
4.	Diklatpim Tk. IV	1.	Emmi Elisabeth P. Panggabean, S.E., M.Ec.	20 Agustus s.d. 14 Desember 2017 (BBPK Jakarta, Kemenkeu, Jln. Wijayakusuma Raya No.45 Cilandak, Jakarta Selatan)
		2.	Dwi Wahyuni Susinawanti, S.E., MIDEC.	
		3.	Dewi Purwaningsih, S.Sos.	
		4.	Suryani, S.Psi., M.Si.	
		5.	Dessy Dwi Astuty, S.H., M.Kn.	
		6.	Tri Astuti Puspita Rini, S.Sos., M.P.P.M.	
		7.	Haris Satya Putra, S.E.	
		8.	Pratita Setianingrum, S.Sos.	
		9.	Arief Setia Budi, S.AP.	

**LAMPIRAN 3 PENGEMBANGAN KAPASITAS SUMBER DAYA
MANUSIA SEKRETARIAT KABINET
SEMESTER I TAHUN 2017**

PENERIMA BEASISWA		
NO.	BEASISWA	JUMLAH PENERIMA
1.	AUSTRALIA AWARDS SCHOLARSHIPS (AAS)	6 Orang
2.	PROGRAM PASCASARJANA (S2 dan S3) LUAR NEGERI (BEASISWA SELAIN AAS)	3 Orang
3.	PROGRAM PASCASARJANA (S2) UNIVERSITAS INDONESIA	9 Orang
4.	PRE-DEPARTURE TRAINING (PDT) AAS	3 Orang